

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI  
TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN  
TERHADAP BARANG JAMINAN**



**TESIS**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-2  
Magister Kenotariatan**

**Disusun oleh :  
TITIN APRILIA, SH  
B4B001204**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

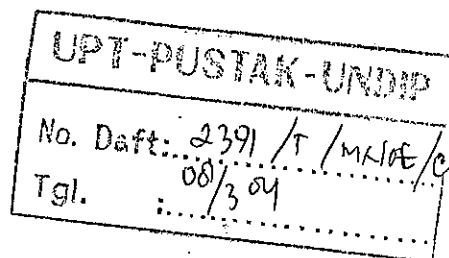
**2003**

# TESIS

## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN TERHADAP BARANG JAMINAN



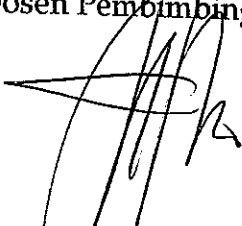
Di susun Oleh :  
**TITIN APRILIA, SH**  
**B4 B001204**



Telah dipertahankan didepan tim penguji  
Pada tanggal 14 November 2003  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

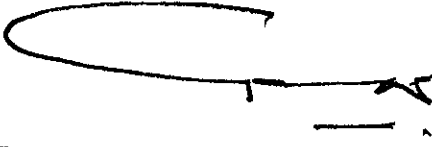
Menyetujui

Dosen Pembimbing,



R. Suharto, SH. MHum

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



Prof. IGN, Sugangga, SH

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,

2003

Yang menyatakan



TITIN APRILIA,SH

## **ABSTRAKSI**

### **Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Perum Pegadaian Terhadap Barang Jaminan**

Gadai merupakan jaminan terhadap benda-benda bergerak dengan menguasai bendanya oleh kreditur pemegang gadai. Unsur terpenting dari hak gadai adalah bahwa benda yang dijaminakan harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai, namun penguasaan itu bukan untuk menikmati, memakai atau memungut hasil, melainkan hanya untuk menjadi jaminan pembayaran hutang pemberi gadai kepada pemegang gadai.

Perusahaan Pegadaian dalam menerima barang jaminan selalu didasarkan pada ukuran itikad baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata, sehingga Pegadaian dapat menganggap, bahwa siapapun yang datang ke Pegadaian dengan membawa barang jaminan untuk digadaikan adalah sebagai pemilik sebenarnya dari barang tersebut.

Pegadaian harus menjaga dan memelihara barang-barang jaminan dengan baik, sehingga tidak terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang-barang jaminan, dan nasabah tidak dirugikan.

Dalam praktek di Perum Pegadaian, ada kemungkinan barang jaminan yang digadaikan bukan milik nasabah sendiri, tetapi barang milik orang lain yang diperoleh dari hasil pencurian maupun penggelapan. Dalam masalah barang jaminan hasil curian, pihak eigenaar mendapat perlindungan hukum berdasarkan Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata dimana eigenaar mempunyai hak untuk merevindikasi barang miliknya kepada pemegang gadai dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak kehilangan atau dicurinya benda miliknya.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (4) KUH Perdata dan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata, pihak Pegadaian mendapat perlindungan hukum dalam hal terjadi permasalahan barang jaminan yang berasal dari hasil penggelapan.

## **ABSTRACT**

### **Evaluation of Yuridis Concerning Responsibility of Pawnshop Office To Pawning Object.**

Pawning represent guarantee of movable goods overbearingly its object by creditor owner of pawning. The most important element of lien is that object which vouch for have to stay in power of owner of pawning, but that domination is not to enjoy, to wear or to collect result, but just for becoming guarantee payment of giver debt pawning to owner of pawn. Pawnshop Office in accepting pawning object is always based on good faith size measure. This matter pursuant to which there are in section 1977 sentence (1) KUH Perdata ( Indonesia Civil Code), so that pawnshop office can assume, that any person who come to pawnshop by bringing pawning object to be pawned is as owner in fact from goods.

Pawnshop office have to take care of and look after guarantee goods better, so that do not happened loss or damage to pawning object, and client not be harmed.

In practice in Pawnshop Office, there is possibility of pawning object which pawned is not property of clients, but goods property of obtained others from result of embezzlement and also theft. In problem of pawning object of stolen, eigenaar get protection of law pursuant to section 1977 sentence ( 2) KUHP Perdata (Indonesia Civil Code), where eigenaar have the right to its property goods revindication to owner pawning within at longest three year since loss or stealing of its property object. While pursuant to rule of section 1152 sentence (4) KUH Perdata and section 1977 sentence (1) KUH Perdata ( Indonesia Civil Code), side of pawner get protection of law in the case of problems of pawning object coming from result of embezzlement.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN TERHADAP BARANG JAMINAN.**

Penulisan ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Magister Notariat Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, tetapi dengan segala keterbatasan yang dimiliki dalam ilmu pengetahuan, waktu dan literatur yang ada, penulis berusaha menyusun tesis ini dengan baik. Dan akhirnya dengan ketekunan dan tekad yang besar serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak penulisan tesis ini dapat selesai.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan serta masukan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu maka penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.SP.PD (K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

3. Bapak H. Achmad Busro, SH.MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH selaku Ketua Program Studi Magister Notariat Universitas Diponegoro.
5. Bapak R. Suharto, SH.MHum selaku Sekretaris Program Studi Magister Notariat Universitas Diponegoro, dan selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
6. Bapak Ery Agus Priyono, SH Msi, selaku dosen wali pada Program Studi Magister Notariat Universitas Diponegoro Semarang.
7. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Notariat Universitas Diponegoro yang telah tulus ikhlas memberikan ilmunya.
8. Tim Reviewer proposal serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu dan bersedia menguji penulisan ini dalam rangka meraih gelar Magister Notariat di Universitas Diponegoro.
9. Bapak Wahyono, SH.MM dan Bapak Mulyono, SE.MM, selaku Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegal serta seluruh staf karyawan yang telah memberikan ijin dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini.
10. Bapak Bripta Suparno dari Kepolisian Resort Brebes yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan wawancara.

12. Segenap rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Magister Notariat Universitas Diponegoro angkatan 2001 yang telah banyak membantu, memberikan dorongan semangat dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.
13. Sahabat-sahabatku tersayang, Lili, Indah, Ricka, Adhe, Rini, Lisa yang selama ini banyak membantu dan memberi dukungan dalam penulisan tesis ini.
14. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
15. Suami dan anak-anakku tercinta, yang telah memberikan cinta kasih, semangat, motivasi dan dorongan yang berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Karena penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kurang sempurnanya penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca berupa kritik dan saran.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum pada khususnya.

Wassalam Wr. Wb.

Semarang,

2003

Penulis



Seandainya aku bisa menghentikan satu hati  
Dari kepedihan,  
Aku tak akan merasa hidup dalam kesia-siaan...

Seandainya aku dapat meringankan beban  
Suatu kehidupan  
Atau meredakan kepedihan,  
Atau membantu seekor burung murai yang  
Pingsan kembali ke sarangnya  
Aku tak akan hidup dalam kesia-siaan,  
karena tiada perbuatan baik yang kecil...

• Emily Dickinson

Karya ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku tersayang
- Suamiku tercinta, Apip Soepriatna
- Anak-anakku tersayang,  
Sakti Rahmadian Kautsar  
Shafira Aurellia
- Almamaterku.

## DAFTAR ISI

Halaman

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAKSI**

**PERNYATAAN**

**KATA PENGANTAR**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Perumusan Masalah ..... 6
- C. Tujuan Penelitian ..... 7
- D. Kegunaan Penelitian..... 7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Perusahaan Umum Pegadaian..... 8
- B. Gadai ..... 10
  - 1. Pengertian Gadai ..... 10
  - 2. Subyek dan Obyek Gadai ..... 16
  - 3. Terjadinya Gadai ..... 21
  - 4. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Pemegang Gadai..... 26
- C. Ajaran-Ajaran Mengenai Pasal 1977 KUHPerdara..... 37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan.....	40
B. Spesifikasi Penelitian.....	41
C. Populasi.....	41
D. Teknik Sampling.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Lokasi Penelitian.....	43
G. Teknik Analisa Data.....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Gadai di Perusahaan Umum Pegadaian	
Cabang Tegal .....	45
1. Struktur Organisasi Kantor Cabang .....	48
2. Sasaran Kredit .....	51
3. Penggolongan Barang Jaminan .....	53
4. Penggolongan Kredit, Tingkat Sewa Modal dan Biaya	
Administrasi.....	55
5. Prosedur Pemberian Kredit Gadai.....	57
6. Pelunasan Kredit Gadai.....	59
7. Lelang Barang Jaminan.....	61
B. Tanggung Jawab Perum Pegadaian Dalam Hal Terjadi	
Kerusakan dan Kehilangan Barang Jaminan.....	64

C. Tanggung jawab Perum Pegadaian Terhadap Barang Jaminan yang Berasal dari Kejahatan (Pencurian atau Penggelapan).....	78
--	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	112

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, perlu ditingkatkan kegiatan perekonomian yang didukung oleh sektor pemerintah sebagai aparat yang berwenang untuk menetapkan kebijaksanaan moneter, serta kegiatan usaha dari para pelaku ekonomi berbagai sektor, baik Badan Usaha Milik Negara, Koperasi maupun swasta.

Keberadaan Lembaga Keuangan dalam masyarakat merupakan salah satu hal yang penting, karena lembaga inilah yang bergerak dalam hal pembiayaan atau sumber dana guna pelaksanaan kegiatan perekonomian. Lembaga Keuangan ini terbagi dalam dua golongan yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.

Salah satu Lembaga Keuangan Non Bank yang ada di Indonesia adalah Perum Pegadaian, yang bergerak dibidang Jasa penyaluran uang

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda bergerak.

Misi dari Pegadaian yaitu ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan <sup>1)</sup> Misi ini sesuai dengan Tugas Pokok Pegadaian seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 39/MK/6/1/1971, Bab II Pasal 2, yaitu :

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada :
  - a. Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif.
  - b. Kaum buruh/pegawai negeri ekonomi lemah yang bersifat konsumtif.
2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap dan praktek riba lainnya.
3. Disamping menyalurkan kredit, melakukan usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat, terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasinya.

Dalam perkembangannya Perum Pegadaian juga mulai mendapat tempat dalam kelompok masyarakat ekonomi menengah keatas. Hal ini dapat

---

1) Ketut Sethyon, Pegadaian, *Menapak Ke Masa Depan Dengan Kegigihan Masa Lalu*, Perum Pegadaian, Jakarta, 2002

terwujud karena adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh Perum Pegadaian. seperti adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perluasan informasi melalui media cetak atau elektronik, dan adanya peningkatan jumlah maksimal pinjaman sampai dengan Rp. 200.000.000,-. Peningkatan jumlah maksimal ini selain untuk memperluas sasaran nasabah juga sebagai upaya peningkatan pendapatan dari Perum Pegadaian itu sendiri.

Untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitasnya, maka sejak April 1990 status hukum Perusahaan dialihkan dari Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Perusahaan Umum (Perum) melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1990 (Lembar Negara Tahun 1990 Nomor : 14)

Dengan perubahan status hukum tersebut, perusahaan dikelola layaknya seperti Perseroan Terbatas (PT), hanya saja modal tidak terdiri dari saham, tapi berbentuk penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Tujuan dan misi perusahaan ditegaskan yaitu disamping memupuk keuntungan juga membantu pemerintah dalam pembangunan dan ekonomi, berupa pemberian kredit skala kecil atas dasar hukum gadai kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Tugasnya mencegah terjadinya praktek riba, rentenir dan gadai gelap di masyarakat.

Pemberian kredit gadai adalah pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang sangat sederhana, mudah, cepat, dan tidak memerlukan administrasi yang menyulitkan. Dengan usaha kredit gadai ini, Pegadaian melindungi masyarakat yang tidak mempunyai akses kedalam industri perbankan, sehingga terhindar dari praktek pemberian



uang pinjaman yang tidak wajar. Pelayanan yang sederhana juga melindungi masyarakat dari prosedur dan persyaratan kredit yang berbelit dan menyusahkan yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat kecil.

Hampir semua benda bergerak dapat dijadikan jaminan kredit, misalnya emas, barang elektronik, mobil, sepeda, sepeda motor, alat-alat rumah tangga dan kain. Fasilitas pinjaman ini umumnya diberikan kepada petani, nelayan, industri kecil, pedagang, ibu-ibu rumah tangga, pegawai negeri dan lain-lain yang membutuhkan uang cepat untuk membiayai segala kegiatannya.

Perjanjian kredit antara Perum Pegadaian dengan penerima kredit dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Pada saat perjanjian ini ditandatangani maka benda gadai diserahkan oleh pemberi gadai kepada Perum Pegadaian. Oleh karena penyerahan benda gadai terjadi pada saat yang bersamaan dengan penandatanganan Surat Bukti Kredit, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian gadai terjadi pada saat Surat Bukti Kredit ditandatangani.

Dalam praktek di Perum Pegadaian yang menjadi masalah dalam tesis ini adalah bahwa ada kemungkinan pada waktu pelunasan kredit, barang jaminan yang akan diambil oleh nasabah ternyata rusak atau hilang yang disebabkan karena terbakar, basah, dimakan binatang, atau karena kelalaian petugas, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah yang bersangkutan

Selain itu, permasalahan lain yang mungkin timbul dalam praktek di Perum Pegadaian adalah masuknya barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, seperti pencurian dan penggelapan sebagai jaminan gadai, dan pemilik sebenarnya menuntut pengembalian dari Pegadaian.

Hal ini dapat terjadi sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak maka dianggap sebagai pemiliknya. Berdasarkan ketentuan itu, maka Pegadaian dapat menganggap, bahwa siapapun yang datang ke Pegadaian dengan membawa barang jaminan untuk digadaikan adalah sebagai pemilik sebenarnya dari barang tersebut

Perum Pegadaian sebagai pemegang gadai tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hal terjadi masalah benda gadai yang berasal dari pencurian atau penggelapan. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

*Dalam hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barangnya gadai, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntut kembali*

Dengan demikian, Pegadaian sebagai pemegang gadai tetap memiliki hak gadai meskipun pemberi gadai bukan orang yang berwenang untuk itu. Apabila benda gadai hasil kejahatan masuk ke Pegadaian tetapi tidak ada laporan dari pemilik sebenarnya, maka perjanjian gadai tetap berlangsung seperti biasanya. Permasalahan baru timbul jika pemilik sebenarnya dari

benda gadai menuntut pengembalian benda itu dan Pegadaian atau melaporkan kejahatan itu ke polisi.

Di lain pihak, pemilik benda gadai yang merasa kehilangan, dapat menuntut kembali benda gadai miliknya yang telah digadaikan oleh orang lain ke pemegang gadai dengan memperhatikan batas waktunya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara yang menentukan bahwa :

*Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang, di dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti-rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 582 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

Dalam hal terjadi permasalahan-permasalahan demikian, Pegadaian sebagai pihak yang menguasai barang jaminan hendaknya bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak debitur, maupun pemilik barang

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk menulis tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Perum Pegadaian Terhadap Barang Jaminan”.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab Perum Pegadaian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dijadikan jaminan ?

2. Bagaimana tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan , baik yang berasal dari pencurian ataupun penggelapan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang-barang jaminan yang digadaikan oleh pihak debitur
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Perum Pegadaian dalam hal terjadi barang jaminan yang digadaikan berasal dari hasil pencurian atau penggelapan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis :
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi gambaran secara umum terhadap penyempurnaan penelitian hukum.
  - b. Sebagai bahan masukan yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Kegunaan Praktis :
  - a. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberi jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
  - b. Hasil penelitian diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perusahaan Umum Pegadaian

Perusahaan Umum Pegadaian merupakan Perusahaan negara yang kegiatannya selain menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan efisien, juga turut serta melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dasar hukum pertama keberadaan Lembaga Pegadaian adalah Staatsblad 1905 No: 490 (*Reglement voor den pandhuisdienst*), yang kemudian disempurnakan dengan Staatsblad 1928 No: 64 (*Wijziging Van Vorschriften betreffende de pandhuisdienst*) dan disempurnakan lagi dengan Staatsblad 1928 No: 81 (*Pandhuisreglement*). Dengan berbagai perubahan mengenai struktur organisasi dan bunga dari kredit dengan jaminan gadai, ketentuan terakhir inilah dengan dipergunakan secara materiil sebagai Aturan Dasar Pegadaian (ADP) hingga sekarang,<sup>2)</sup> yang berisikan petunjuk-petunjuk mengenai cara kerja dan pertanggung jawaban para petugas Perusahaan Umum Pegadaian.

Lembaga Pegadaian berasal dari Dinas Pegadaian yang merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan Undang-undang No.19 tahun 1960 Dinas Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara. Sebagai

---

<sup>2)</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung 1981, halaman 72

pelaksanaan dari Undang-undang tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No : 178 tahun 1961 tanggal 3 Mei 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Pegadaian. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah No : 7 tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 kedudukan Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Perusahaan Jawatan merupakan salah satu bentuk usaha negara berstatus Badan Hukum yang diatur dalam Undang-undang No : 9 tahun 1969.

Untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitasnya, bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No : 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Selanjutnya ketentuan terakhir yang dikeluarkan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah No : 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian dengan menyelenggarakan usaha :

- a. Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan-pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu di unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya.

Maksud didirikan Perusahaan Umum Pegadaian oleh pemerintah adalah untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah dalam pemberian pinjaman uang, sehingga dapat mencegah adanya praktek-praktek riba atau gadai gelap dikalangan masyarakat Indonesia. Adapun tugas pokok pegadaian dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>3)</sup>

- a. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada :

---

<sup>3)</sup> Adang Maryuani, *Pegadaian*, Sanggabuana, Jakarta, 1976, halaman 10

- Petani, pedagang, industri dan sebagainya agar mereka dapat terus memproduksi
  - Pegawai atau karyawan yang ekonominya lemah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.
- b. Ikut serta mencegah adanya pemberian kredit yang tidak wajar, ijon dan memberantas praktek rentenir. Praktek rentenir adalah pekerjaan meminjamkan uang dengan bunga pinjaman yang tinggi, akibatnya peminjam kesulitan untuk mengembalikan pinjamannya.
- c. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasionalnya.

## **B. Gadai**

### **1) Pengertian Gadai**

Pengertian gadai diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang memberikan perumusan sebagai berikut :

*“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.*

Dari definisi gadai tersebut terdapat beberapa unsur yang pokok, yaitu:

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur.
3. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh.
4. Kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dulu dari pada kreditur-kreditur lainnya.<sup>4)</sup>

Selain hal tersebut diatas, berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan dalam Pasal 1150 KUH Perdata maka dapat disimpulkan bahwa konsep pegadaian memiliki unsur-unsur utama, yaitu :<sup>5)</sup>

- a. Lembaga Pembiayaan.
- b. Sistem gadai
- c. Cara pengembalian pinjaman
- d. Pelunasan biaya-biaya

**a) Lembaga Pembiayaan**

Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Lembaga Pembiayaan

---

<sup>4)</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2001.

<sup>5)</sup> Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.



Pegadaian dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan Undang-undang dibolehkan melakukan pembiayaan dalam bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.

***b) Sistem Gadai***

Dalam perjanjian pinjam uang, kreditur dapat menentukan jaminan piutangnya berupa barang bergerak yang nilainya seimbang atau lebih besar dari jumlah piutang. Barang bergerak tersebut harus diserahkan kepada dan berada dalam kekuasaan kreditur sampai pinjaman debitur itu dilunasi. Dalam hal ini terdapat dua perjanjian, pertama perjanjian pinjam uang sebagai perjanjian pokok, dan kedua perjanjian gadai sebagai pelengkap (*accessoir*) dari perjanjian pokok.

Sistem gadai ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap debitur yang meminjam uang pada Pegadaian. Dengan sistem ini pegadaian dapat menghindari resiko tidak dilunasinya piutang oleh debitur. Artinya apabila pada saat jatuh tempo debitur tidak melunasi hutangnya, kreditur berhak untuk menjual lelang barang jaminan guna mengambil pelunasan piutangnya, dan jika masih ada sisanya akan dikembalikan pada debitur.

***c) Cara Pengembalian Pinjaman***

Setiap pinjaman ditentukan hari jatuh temponya. Hari jatuh tempo adalah hari kapan pinjaman itu harus dilunasi. Walaupun ditentukan

hari jatuh tempo, peminjam (debitur) boleh melunasi pinjamannya sebelum hari jatuh tempo itu tiba. Pelunasan pinjaman boleh secara angsuran atau sekaligus pada hari jatuh tempo. Bersamaan dengan pelunasan hutang tersebut, pegadaian mengembalikan barang jaminan kepada peminjam (debitur) bersama dengan dokumen bukti pelunasan hutang dan dokumen pengembalian barang jaminan.

**d) *Pelunasan Biaya-biaya***

Semua biaya pemeliharaan barang jaminan dan biaya lelang dalam hal terjadi pelelangan barang jaminan, harus dilunasi lebih dahulu oleh peminjam (debitur). Pelunasan tersebut diambilkan dari hasil pelelangan barang jaminan, sesudah itu sisanya baru digunakan untuk melunasi pinjaman.

Dari perumusan gadai tersebut ternyata belum ditemukan tentang sifat-sifat umum dari gadai. Untuk menemukan sifat-sifat umum gadai dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan lain dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun sifat-sifat dari gadai adalah sebagai berikut :

**a. Gadai adalah hak kebendaan.**

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata tidak menyebutkan sifat ini, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "*Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata, apabila barang gadai hilang atau dicuri*". Oleh karena hak gadai

mengandung hak revindikasi maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan.

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti hak eigendom, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Memang benda gadai harus diserahkan kepada kreditur tetapi tidak untuk dinikmati melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

*b. Hak Gadai bersifat *accessoir**

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian pinjam uang, sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang, dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya bergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.

Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah pada orang lain bersama-sama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan *accessoir* dengan perjanjian pokoknya.

c. Hak Gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani benda gadai secara keseluruhan.

Dalam Pasal 1160 KUH Perdata disebutkan bahwa "*Tak dapatnya hak gadai dibagi-bagi dalam hal kreditur atau debitur meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris*".

Ketentuan ini tidak merupakan hukum yang memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain sifat tak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

d. Hak Gadai adalah hak yang didahulukan

Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 1133 dan 1150 KUH Perdata "*Kreditur pemegang gadai mempunyai hak mendahulukan (droit de preference) karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan dari pada piutang-piutang lainnya*".

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata disebutkan bahwa "*hak didahulukan ini ada pengecualiannya yaitu biaya lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda gadai*".

- e. Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh.
- f. Hak Gadai adalah jaminan yang kuat dan mudah pelaksanaannya

Menurut Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa  
*“Hak gadai dan hipotik lebih diutamakan daripada privilege, kecuali  
jika undang-undang menentukan sebaliknya”*.

Dari bunyi pasal-pasal tersebut jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat. Disamping itu kreditur pemegang gadai adalah termasuk kreditur separatis. Selaku separatis pemegang gadai tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan si debitur.

Kemudian apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai dapat dengan mudah menjual benda gadai tanpa memerlukan perantara hakim, asalkan penjualan benda gadai dilakukan dimuka umum dengan lelang dan menurut kebiasaan setempat dan harus memberitahukan secara tertulis lebih dahulu akan maksud-maksud yang akan dilakukan oleh pemegang gadai apabila tidak ditebus (Pasal 1155 juncto 1156 ayat (2) KUH Perdata). Jadi disini acara penyitaan lewat juru sita dengan ketentuan-ketentuan menurut Hukum Acara Perdata tidak berlaku bagi gadai.<sup>6)</sup>

## 2) Subyek dan Obyek Gadai

### a. Subyek Gadai

Sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian jaminan pada umumnya, jika seseorang membuat suatu perjanjian jaminan maka sebenarnya di dalamnya terkandung dua jenis perjanjian. Pertama adalah perjanjian hutang-piutang uang (sebagai perjanjian pokok) dan yang

---

<sup>6)</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, Op.Cit. hal. 15

kedua adalah perjanjian jaminan yang bersifat *accessoir* Subyek dari masing-masing perjanjian tersebut ada dua. Dalam perjanjian pokok subyeknya adalah pihak kreditur dan pihak debitur. Kreditur adalah pihak yang memberi hutang (pihak berpiutang), sedang debitur adalah pihak yang berhutang. Pemberi jaminan adalah pihak yang menyediakan (memberikan jaminan) dan pemegang jaminan adalah pihak yang menerima jaminan.

Dalam hal masing-masing subyek dalam kedua perjanjian tersebut terpisah satu dengan yang lain, maka dalam perjanjian jaminan terdapat empat subyek. Jika debitur adalah pemberi jaminan dan kreditur adalah pemegang jaminan, maka dalam dua jenis perjanjian tersebut hanya terdapat dua subyek. Kemungkinan lain adalah kreditur dan pemegang jaminan berada dalam satu tangan, sedangkan debitur dan pemberi jaminan terpisah, atau sebaliknya dimana debitur dan pemberi jaminan berada dalam satu tangan sedang kreditur dan pemegang jaminan terpisah, dalam keadaan demikian maka terdapat tiga subyek.

Dalam hal gadai, pemberi gadai biasanya adalah debitur sendiri, namun dapat juga dilakukan oleh orang lain atas nama debitur. Jadi disini ada seseorang yang menggadaikan barang miliknya untuk hutang yang dibuat debitur (Pasal 1156 KUH Perdata). Demikian juga pemegang gadai, biasanya adalah kreditur sendiri maka ia juga disebut kreditur pemegang gadai. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak ketiga (Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata). Kalau barang gadai dipegang oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut disebut pihak ketiga pemegang gadai.

Munculnya pihak ketiga sebagai pemberi gadai dapat terjadi karena adanya pembelian benda gadai oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang memberikan jaminan disebut pihak ketiga pemberi gadai. Pihak ketiga tersebut termasuk orang yang bertanggung jawab untuk orang lain atas suatu hutang, namun bentuk tanggung jawab itu hanya terbatas sebesar benda yang diberikan, untuk selebihnya menjadi tanggungan debitur sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai hutang karena ia bukan debitur, jadi kreditur pemegang gadai tidak mempunyai hak tagih kepadanya.

*b. Obyek Gadai*

Obyek dari gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat di lihat dalam Pasal 1150 jo 1152 ayat (1), 1152 bis dan 1153 KUH Perdata. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindah tangankan tidak dapat digadaikan.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, obyek yang dapat dijadikan gadai meliputi semua benda-benda bergerak yang terdiri dari :

- a) Benda bergerak berwujud
- b) Benda bergerak yang tidak berwujud yang meliputi hak untuk mendapatkan pembayaran uang, dapat berupa surat-surat piutang *aan toonder* (kepada si pembawa), *aan order* (atas tunjuk), dan *op naam* (atas nama).<sup>7)</sup>

Dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata disebut tentang hak gadai atas surat bawa dan seterusnya, demikian juga dalam Pasal 1152 bis

---

<sup>7)</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 98

disebutkan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan endosemen dan penyerahan suratnya. Penyebutan surat-surat ini dapat menimbulkan kesan yang keliru mengenai obyek gadai. Surat bawa maupun surat tunjuk bukanlah obyek gadai. Yang menjadi obyek gadai adalah piutang-piutang yang dibuktikan dengan surat itu.<sup>8)</sup> Adapun yang dimaksudkan dengan hak tagihan atau piutang (*vorderingsrechten*) adalah hak menagih atas prestasi, oleh seorang kreditur terhadap debitur tertentu berdasarkan suatu perikatan, biasanya prestasi itu berwujud pemenuhan sejumlah uang. Dengan demikian obyek dari hak gadai adalah hak tagihan atas pemenuhan prestasi (piutang). KUH Perdata membedakan ketentuan-ketentuan mengenai piutang-piutang tersebut sebagai berikut :

- a) Piutang atas bawa (*Vordering aan toonder*) diatur dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata.

Surat (piutang) atas bawa adalah surat yang dibuat debitur dimana diterangkan bahwa ia berhutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat, surat mana diserahkan kedalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitur, dengan mengembalikan surat atas bawa itu kepada debitur.<sup>9)</sup>

- b) Piutang atas tunjuk (*vordering aan order*) diatur dalam Pasal 1152 bis KUH Perdata

---

<sup>8)</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, Op.Cit. halaman 17

<sup>9)</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, hal 96-97



Surat (piutang) atas tunjuk merupakan surat-surat yang menunjukkan orang-orang tertentu kepada siapa perikatan harus dilunasi, dengan hak untuk memindahkannya kepada orang lain melalui endosemen. Endosemen adalah keterangan yang ditulis dibalik surat hutang yang ditandatangani oleh pemilik piutang, yang menyatakan kepada siapa piutangnya telah di endosser (dipindahkan).

Bentuk gadai piutang atas tunjuk misalnya wesel. Wesel adalah surat yang mengandung perintah dari penerbit (*trekker*) kepada tersangkut (*betrokken*), untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang (*hounder*). Hak yang timbul dari wesel itu, oleh pemegang wesel dapat diletakkan sebagai jaminan kredit terhadap pemberi kredit.

- c) Piutang atas nama (*vordering op naam*) diatur dalam Pasal 1153 KUH Perdata.

Surat (piutang) atas nama merupakan surat atas tagihan pelimpahan piutang pemberi gadai kepada kreditur (pemegang gadai) terhadap debitur. Kreditur dan pemberi gadai harus memberitahukan mengenai hak gadai piutang atas nama, yang diadakan dengan memberitahukan akan penggadaianannya (perjanjian gadainya) kepada debitur. Dalam pemberitahuan ini debitur dapat meminta bukti tertulis perihal penggadaianannya dan persetujuan dari pemberi gadai.

Dalam gadai piutang atas nama tersangkut tiga pihak seperti pada penyerahan atas nama (*cessie*), sehingga gadai piutang atas nama

juga dinamakan gadai cessie karena penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan cessie.

### 3) Terjadinya Gadai

Untuk terjadinya gadai harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digadaikan. Pada dasarnya hak gadai diletakkan dengan membawa benda gadai dibawah kekuasaan kreditur atau dibawah kekuasaan pihak ketiga atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terjadinya gadai adalah dengan adanya suatu penyerahan. Pengertian penyerahan atau levering ada dua macam, yaitu :<sup>10)</sup>

#### a) Penyerahan yuridis (*yuridiche levering*)

Dengan adanya penyerahan yuridis menyebabkan seorang yang menerima penyerahan menjadi orang yang berhak atau menjadi eigenaar. Dengan penyerahan yuridis belum tentu benda yang dimiliki berada dalam kekuasaannya.

#### b) Penyerahan nyata (*feitelijke levering*)

Penyerahan nyata merupakan penyerahan kekuasaan atas suatu benda secara nyata, sehingga orang yang menerima benar-benar menguasai benda tersebut.

Pada umumnya pelaksanaannya praktek gadai untuk benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh terdiri dari dua fase :

#### 1) Fase Pertama

---

<sup>10)</sup> Hartono Hadisuprpto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, halaman 21

Fase pertama adalah perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir. Perjanjian ini merupakan titel dari perjanjian pemberian gadai.

## 2) Fase Kedua

Penyerahan benda gadai dalam kekuasaan pemberi gadai. Karena benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan debitur itu.

Penyerahan ini memerlukan juga “kemauan bebas” dari kedua belah pihak. Penyerahan yang nyata ini jatuh bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan disini merupakan unsur sahnya gadai, penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan.

Oleh karena penyerahan di dalam penguasaan pemegang gadai merupakan syarat esensiil, maka tidak sah jika benda itu tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai (debitur), atau karena kemauan kreditur benda gadai berada dalam penguasaan debitur, atau debitur menyatakan saja gadai berada pada pemegang gadai, sedangkan sebenarnya masih berada pada debitur / pemberi gadai (Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata).

Demikian juga hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, kecuali jika barang itu hilang atau di curi dari padanya (Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata).

# 1. Cara terjadinya gadai pada benda bergerak bertubuh

## a. Perjanjian gadai

Dalam hal ini antara debitur dan kreditur mengadakan perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan gadai atau perjanjian untuk memberikan hak gadai (perjanjian gadai) Perjanjian ini bersifat konsensual dan obligatoir Menurut Pasal 1151 KUH Perdata disebutkan bahwa "Perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian perjanjian pokok" Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai tidak terikat dengan formalitas tertentu (bebas); sehingga dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.

## b. Penyerahan benda gadai

Dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata disebutkan bahwa "*Tidak ada hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaannya si debitur ataupun yang kembali dalam kekuasaannya si debitur atas kemauan si kreditur*". Dengan demikian hak gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai keluar dari kekuasaannya si debitur pemberi gadai. Syarat bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaannya si pemberi gadai ini merupakan syarat "*inbezitstelling*" yang merupakan syarat mutlak harus dipenuhi dalam gadai.

Barang dikatakan dibawa keluar dari kekuasaan pemberi gadai jika barang gadai diserahkan oleh pemberi gadai kepada kreditur atau pihak ketiga (sebagai pemegang gadai) yang disetujui oleh kreditur. Mengingat benda gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan pemberi gadai, maka diperlukan suatu penyerahan. Penyerahan benda gadai dapat dilakukan secara nyata, simbolis, *traditio brevimanu* ataupun *traditio longamanu*, penyerahan secara *constitutum possessorium* tidak menimbulkan hak gadai karena tidak memenuhi syarat *inbezitstelling* dalam gadai.

2. Cara terjadinya gadai pada piutang atas bawa (*aan toonder*)

a. Perjanjian gadai

Antara debitur dan kreditur dibuat perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir dan bentuknya bebas.

b. Penyerahan surat bukti

Dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa "*Gadai surat atas bawa terjadi dengan menyerahkan surat itu ke dalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak*". Surat (piutang) atas bawa adalah surat yang dibuat debitur dimana diterangkan bahwa ia berhutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat, dan kemudian surat itu diserahkan kedalam tangan

pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitur dengan mengembalikan surat atas bawa itu kepada debitur.

3. Cara terjadinya gadai pada piutang atas tunjuk (*aan order*)

a. Perjanjian gadai

Antara debitur dan kreditur dibuat perjanjian untuk memberikan hak gadai yang bersifat konsensual, obligatoir dan bentuknya bebas.

b. Adanya endorsemen yang di ikuti dengan penyerahan suratnya.

Dalam Pasal 1152 bis KUH Perdata disebutkan bahwa *"untuk mengadakan hak gadai piutang atas tunjuk diperlukan adanya endorsemen pada surat hutangnya dan diserahkannya surat hutang kepada pemegang gadai"*

Endossemen *adalah* pernyataan penyerahan piutang yang ditandatangani kreditur (*endosan*) yang bertindak sebagai pemberi gadai dan harus memuat nama pemegang gadai (*geendosseerde*). Bentuk gadai piutang atau tunjuk misalnya wesel.

4. Cara terjadinya gadai pada piutang atas nama (*oop naam*)

a. Perjanjian gadai

Antara debitur dan kreditur dibuat perjanjian gadai yang bersifat konsensual obligatoir dan bentuknya bebas.

- b. Adanya pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan.

Dalam Pasal 1153 KUH Perdata disebutkan bahwa  
*"Hak gadai piutang atas nama diadakan dengan memberitahukan akan penggadaiannya (perjanjian gadainya) kepada debitur"*

Cara *penyerahan* piutang atas nama dengan jalan memberitahukan mengenai perjanjian gadainya kepada debitur, yaitu terhadap siapa hak gadai itu akan dilaksanakan. Setelah pemberitahuan tersebut debitur hanya dapat membayar hutangnya pada pemegang gadai atau yang berpiutang (yang menerima gadai). Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara bebas, dengan lisan maupun tertulis.

#### **4) Hak dan Kewajiban Pemberi dan Pemegang Gadai**

Selama berlangsungnya gadai, pemberi dan pemegang gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik terhadap gadai benda bergerak bertubuh maupun gadai benda bergerak tidak bertubuh.

##### **a. Hak Pemberi Gadai**

Hak-hak yang dimiliki pemberi gadai adalah sebagai berikut:

1. Setelah terjadinya perjanjian antara kreditur dan debitur mengenai utang piutang / perjanjian kredit, selanjutnya diikuti penyerahan hak

milik atas barang-barang bergerak sebagai jaminan kepada berpiutang. Dengan demikian pemberi gadai berhak mendapatkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

2. Pemberi gadai berhak mendapatkan ganti rugi secara layak dan pantas jika benda gadai tersebut hilang, rusak atau musnah dari kekuasaan penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari penerima gadai apabila benda gadai akan dijual.
4. Pemberi gadai berhak untuk menerima sisa hasil dari pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan pokok piutang, pokok bunga dan biaya dari pemegang gadai. Kelebihan hasil penjualan benda gadai dalam hal harga penjualan benda gadai yang dilelang lebih besar dari nilai pinjaman.
5. Pemberi gadai berhak untuk meminta kembali benda gadainya setelah hutang dan bunga ditambah biaya dibayar lunas kepada penerima gadai (pemegang gadai). Dengan diserahkannya benda yang dijaminnya itu pada kekuasaan pemberi gadai maka kembalilah benda itu dalam kedudukan semula

#### **b. Kewajiban pemberi gadai**

Pemberi gadai mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Pemberi gadai berkewajiban menyerahkan barang gadai dalam kekuasaan penerima gadai.



2. Demi keselamatan barang gadai dari bencana alam (*force majeure*) di dalam praktek sering pemberi gadai diwajibkan untuk mengasuransikan barang gadai. Kewajiban ini memang efektif untuk gadai dalam jumlah besar.
3. Pemberi gadai mempunyai kewajiban mengganti segala biaya kepada pemegang gadai atas segala upaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan barang gadai. Apabila yang digadaikan adalah piutang, maka selama piutang itu digadaikan, pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debitur. Jika debitur piutang gadai telah membayar hutangnya kepada pemberi gadai maka pembayaran itu tidak sah dan kewajibannya untuk membayar kepada pemegang gadai tetap mengikat.

### c. Hak Pemegang Gadai

Hak-hak pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Hak Untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau hak untuk mengeksekusi benda gadai (*parate executie*)

Menurut Pasal 1155 KUH Perdata disebutkan bahwa

*“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, jika si berhutang atau si pemberi gadai wanprestasi, maka si kreditur berhak menjual barang gadai, dengan maksud untuk mengambil perlunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”.*

Untuk melakukan penjualan ini pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (*somatie*) kepada pemberi gadai

supaya hutangnya dibayar. Penjualan ini harus dilakukan didepan umum, menurut kebiasaan setempat serta atas syarat yang lazim berlaku. Ketentuan ini bersifat memaksa, karena berhubungan dengan ketertiban umum. Wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur, diberikan tanpa memiliki eksekutorial titel. Penjualan yang dilakukan kreditur merupakan *parate esksekusi*. Hak pemegang gadai ini tidak lahir dari perjanjian dinyatakan dengan tegas oleh para pihak, akan tetapi terjadi demi hukum, kecuali jika diperjanjikan lain.

## 2. Hak untuk menahan benda gadai (*hak retensi*)

Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa

*“Dalam hal pemegang gadai tidak menyalahgunakan benda gadai, maka si berhutang tidak berkuasa untuk menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjaminnya barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai”.*

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan benda gadai selama debitur belum melunasi hutangnya. Dalam Pasal 1159 ayat 2 KUH Perdata diatur si pemegang gadai mempunyai hak retensi atas benda gadai. Hal ini terjadi apabila setelah adanya perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang pertama itu sendiri. Dalam keadaan yang demikian si kreditur/pemegang gadai tidak mempunyai kewajiban untuk melepaskan benda gadai (ia mempunyai wewenang untuk menahan benda

gadai/hak retensi) sampai kedua macam hutang tersebut dibayar lunas.

### 3. Hak Kompensasi

Hak ini erat hubungannya dengan hutang kedua sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1159 ayat 2 KUH Perdata. Apabila guna melunasi piutang pertama si kreditur telah mengeksekusi benda gadai, maka dari hasil pendapatan lelang kreditur dapat mengambil lebih dahulu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan piutang pertama yang dijamin dengan gadai. Jika ada sisa, maka diserahkan kepada debitur. Apabila sisa tersebut tidak diserahkan kepada debitur, maka kreditur berhutang kepada debitur. Dalam Pasal 1425 KUH Perdata disebutkan bahwa

*“Jika dua orang saling berhutang satu kepada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemegang gadai dapat mengkompensasi piutang yang kedua dengan hutangnya (Sisa penjualan benda gadai) kepada debitur.

### 4. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda gadai.

Oleh karena pemegang gadai bukan pemilik dari benda gadai, maka sudah sewajarnya jika setelah ia mengeluarkan biaya untuk menyelamatkan benda gadai meminta ganti rugi kepada pemiliknya (debitur). Pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata menentukan bahwa yang

harus diganti oleh debitur adalah biaya-biaya yang berguna dan perlu yang dikeluarkan guna keselamatan barang gadai. Selama biaya-biaya itu belum dibayar, maka si kreditur tidak diwajibkan untuk mengembalikan barang gadai kepada debitur. Disini kreditur mempunyai hak rentensi juga.

5. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur.

Jika debitur pailit, maka kreditur pemegang gadai dapat melaksanakan hak-haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan (pasal 56 ayat 1 Peraturan Kepailitan). Dengan demikian hak kreditur untuk melaksanakan parate eksekusi tidak menjadi berkurang dengan terjadinya kepailitan debitur. Hak untuk menjual barang gadai harus dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan setelah debitur dinyatakan pailit, kecuali jika waktu diperpanjang oleh hakim.

6. Hak Preferensi

Kreditur pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dari pada kreditur-kreditur yang lain.

7. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai

Pemegang gadai dapat menuntut agar benda gadai akan tetap pada pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonnis hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat 1 KUH Perdata). Hal ini berarti bahwa barang gadai dibeli oleh kreditur dengan harga pantas menurut pendapat hakim.

8. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan piutang dapat juga terjadi jika siberpiutang menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara-cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang pokok beserta bunga dan biaya. Hal seperti ini biasanya terjadi jika benda berupa barang antik.

9. Hak untuk menerima bunga piutang gadai

Hak ini berdasar Pasal 1158 KUH Perdata yang menentukan bahwa

*“Pemegang gadai dari suatu piutang yang menghasilkan bunga, berhak menerima bunga itu, dengan kewajiban memperhitungkan dengan bunga piutang yang harus dibayarkan kepadanya.*

10. Hak untuk menagih piutang gadai

Hak ini dilakukan dengan cara pemberian kuasa yang tak dapat dicabut kembali dari pembeli gadai kepada pemegang gadai untuk menagih dan menerima pembayaran dari debitur yang hutang-hutangnya digadaikan. Pemberian kuasa ini dicantumkan dalam perjanjian gadai dan dikonstruksikan sebagai gadai dari pemberi hak gadai. Konstruksi ini dimaksudkan untuk mencegah agar kuasa tidak menjadi berakhir dengan kematian atau pailitnya pemberi gadai.

**d. Kewajiban Pemegang Gadai**

Adapun kewajiban-kewajiban dari pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual.

Mengenai pemberitahuan kepada pemberi gadai serta perhitungan tentang pendapatan dari penjualan barang gadai adalah perwujudan dari asas itikad baik, yaitu untuk mencegah pemegang gadai menjual barang gadai secara diam-diam. Kewajiban memberitahukan ini selambat-lambatnya pada hari berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya dengan pos yang berangkat pertama. Pemberitahuan dengan telegraf atau surat tercatat berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUH Perdata).

2. Kewajiban memelihara benda gadai

Kewajiban ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1157 ayat 1 dan 1159 ayat 1 KUH Perdata. Dalam Pasal 1157 ayat 1 ditentukan bahwa *"Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya"*. Begitu juga pemegang gadai tidak boleh menyalahgunakan benda gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata).

3. Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai.
4. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai

Kewajiban ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata, yaitu apabila :

- a. Kreditur telah menyalahgunakan barang gadai.
  - b. Debitur telah melunasi sepenuhnya, baik uang pokok, bunga dan biaya hutangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai.
5. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitur. Bunga-bunga yang telah diterima kreditur dari debitur harus diperhitungkan dengan besar piutang dan atau bunganya.
  6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.

Dalam penagihan piutang gadai pemegang gadai akan menagih seluruh besarnya piutang gadai. Apabila hasil penagihan itu melebihi besarnya piutang pokok, bunga dan biaya, maka kreditur pemegang gadai harus menyerahkan sisanya kepada pemberi gadai. Jika ternyata hasil penagihan lebih kecil daripada jumlah seluruh piutang pemegang gadai, maka kreditur pemegang gadai masih mempunyai piutang terhadap debitur.

## **5) Berakhirnya Gadai**

Hak gadai dalam praktek gadai berakhir dengan adanya hal-hal tersebut dibawah ini :

a) Karena hapusnya perikatan pokok

Dengan melakukan pelunasan hutang, maka perikatan pokok telah berakhir. Hapusnya perikatan pokok mengakibatkan hapusnya hak gadai yang bersifat aksesoir terhadap perikatan pokok.

Perikatan pokok dalam gadai adalah pinjam-meminjam uang, jika hutang telah dilunasi oleh debitur pemberi gadai, maka perikatan pokok menjadi berakhir dan hak gadai ikut berakhir pula.

b) Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai

Pasal 1152 ayat (3) menyatakan bahwa, "*Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai*". Namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan sukarela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika ia memperoleh kembali barang gadai tersebut maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

c) Karena musnahnya benda gadai

Musnahnya benda gadai menyebabkan berakhirnya gadai, sebab tidak mungkin ada hak gadai tanpa adanya obyek gadai.

d) Karena penyalahgunaan benda gadai

Dalam Pasal 1159 ayat (2) KUH Perdata disebutkan bahwa "*apabila kreditur menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai*". Disini menunjukan bahwa hak gadai hapus demi hukum apabila pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai.



e) Karena kreditur melepaskan benda gadai secara sukarela

Dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa tidak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai. Hal ini berarti pemegang gadai harus menguasai secara fisik benda gadai (*asas inbezitstelling*). Apabila kreditur melepaskan penguasaan terhadap benda gadai, maka hak gadai menjadi hapus.

f) Karena pelaksanaan eksekusi

Dengan dilaksanakannya pelelangan (*parate executie*), maka kekuasaan atas benda gadai telah berpindah pada orang lain. Oleh karena itu hak gadai menjadi hapus.

Prinsip-prinsip untuk memperoleh hak eigendom atas suatu benda bergerak sebagaimana tercantum dalam pasal 1977 KUH. Perdata berlaku bagi perolehan hak gadai atas suatu benda. Seseorang yang memperoleh suatu benda bergerak dari orang yang tak berwenang memindahtangankan benda itu kepada orang lain, menjadi *eigenaar* atas benda tersebut, apabila ia beritikad baik. Demikian pula hak gadai, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si kreditor yang telah menerima barang tersebut dalam gadai. Hal ini berarti, bahwa kreditor tetap memperoleh hak gadai meskipun pemberi gadai bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Akan tetapi persyaratan tentang itikad baik masih tetap harus diperhatikan.

Ukuran itikad baik dalam hal ini adalah pemegang (penerima) gadai tidak atau tidak seharusnya mengetahui, bahwa benda gadai adalah bukan milik pemberi gadai.

Seorang kreditor yang menerima benda dalam gadai dari seseorang yang hanya berstatus penyewa benda tersebut, memperoleh hak gadai yang sah atas benda itu, jika ia beritikad baik. Ia dilindungi terhadap pemilik. Pemilik hanya dapat menuntut kembali bendanya, hanya apabila ia melunasi piutangnya kreditor (pemegang gadai). Kreditor (pemegang gadai) juga dilindungi terhadap *eigenaar* yang telah memperoleh kembali hak eigendommenya, karena adanya pembatalan jual beli antara *eigenaar* tersebut dengan pemberi jaminan. Dalam hal ini *Zakelijke werking* dari kebatalan itu tidak berlaku terhadap pemegang gadai.

Kreditur baru berkewajiban menyerahkan benda gadai kepada *eigenaar* setelah seluruh piutang kreditur dilunasi oleh *eigenaar* tersebut.

Sebaliknya apabila kreditur (pemegang gadai) beritikad buruk, ataupun apabila *eigenaar* benda yang digadaikan telah kehilangan kekuasaan atas benda tersebut tidak dengan sukarela (yaitu kecurian atau kehilangan), maka yang dilindungi hukum adalah si *eigenaar*. *Eigenaar* benda gadai dalam jangka waktu 3 tahun berhak menuntut kembali bendanya itu dari kreditur (pemegang gadai) dengan tidak usah membayar piutang si kreditur<sup>11</sup>

### C. Ajaran-ajaran Mengenai Pasal 1977

Mengenai untuk siapakah sebenarnya ketentuan pasal 1977 itu disediakan, atau apakah yang dimaksud dengan “bezit” dalam pasal 1977 itu, ada tiga pendapat atau ajaran-ajaran yang menonjol tentang hal ini.

<sup>11</sup> P.J. Soepratignya, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Hukum Benda Jilid 2*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1983

Ajaran-ajaran tersebut, yaitu :

1. Ajaran detentie adalah eigendom

Tokoh dari ajaran ini yaitu Land. Menurut ajaran ini, kebendaan bergerak tidak atas nama (untuk selanjutnya akan disebut “kebendaan bergerak” saja) tidak mengenal bezit dan eigendom, karena detentie adalah hak yang paling sempurna.

Sebagai konsekwensi dari pendapatan tersebut, orang yang melepaskan kebendaan bergerakanya untuk dipinjamkan, disewakan atau dititipkan kepada orang lain akan menjadi kehilangan hak kebendaannya. Orang tersebut tidak lagi mempunyai gugatan kebendaan. Ia hanya mempunyai gugatan perorangan pada orang yang menguasai kebendaan yang bersangkutan. Menurut pendapat ini, untuk kebendaan bergerak tidak mungkin ada revindikasi.

2. Ajaran bezit adalah eigendom

Berbeda dengan ajaran pertama, menurut ajaran dari Diephuis dan Mayers ini, untuk kebendaan bergerak, bezit perdata adalah hak yang paling sempurna.

Menurut pasal 1977 ayat 1 bezit berlaku sebagai alas hak yang sempurna. Alas hak yang sempurna adalah eigendom. Dengan demikian bezit adalah eigendom. Ini berarti, siapa yang menguasai suatu benda bergerak untuk dirinya sendiri adalah *eigenaar*.

Menurut pendapat ini selanjutnya, tidaklah menjadi soal. bagaimana orang telah dapat memperoleh bezit. Dengan alas hak yang sah ataupun tanpa

alas hak, dari orang yang berwenang atau tidak, bezit saja sudah memberikan eigendom.

### 3. Teori Legitimasi

Tokoh dari ajaran ini adalah Paul Scholten. Dengan pendapat ini, pasal 1977 KUH Perdata dikembalikan pada kedudukannya yang wajar, yang memahami tuntutan-tuntutan pergaulan berkenaan dengan lalu lintas hukum mengenai benda-benda bergerak tak terdiri atas nama.

Bezit atas benda bergerak tidak atas nama, menurut pendapat ini adalah “legitimasi” bagi yang berhak. Jadi bezit bukan eigendom, tetapi bagi siapa yang dengan itikad baik menduga berzitter sebagai *eigenaar*, adalah “safe” (aman). Bezit itu membuktikan orang yang menguasai bendanya sebagai yang berhak penuh, sebagai *eigenaar*.

Menurut teori legitimasi, untuk memperoleh kebendaan yang disebutkan dalam pasal 1977, karena penyerahan, harus pula memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya penyerahan, yang ditentukan oleh pasal 584. Hanya saja pendapat ini telah menghapuskan salah satu syarat, yaitu tentang “kewenangan” dari yang berhak (*baschikkingsbevoegd*). Syarat-syarat lain, yaitu yang mengharuskan adanya “titel” (alas hak) yang sah, masih tetap dipertahankan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Purwahid Patrik dan Suharto, *Hukum Perdata I (Asas-Asas Hukum Benda)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1996

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih diperlukan kebenarannya.<sup>13)</sup>

Dalam penelitian ini dibutuhkan data yang akurat yang dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian perpustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan Wawancara pada pihak-pihak yang bersangkutan dengan tesis ini yang mendukung pengkajian data, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat dijawab secara tuntas.

Data-data tersebut dapat diperoleh melalui proses penelitian dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

#### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris, karena yang diteliti adalah permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap barang-barang jaminan yang digadaikan. Metode pendekatan yuridis empiris ini digunakan dalam rangka

---

<sup>13)</sup> Soetrisno Hadi, *Metode Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983.

untuk mengetahui efektifitas hukum yang menghubungkan antara norma hukum positif yang berlaku dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat dalam proses untuk menemukan teori-teori, pendapat-pendapat ahli maupun bekerjanya hukum.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, karena hasil-hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap barang-barang jaminan yang digadaikan, sehingga dapat dilakukan suatu analisa terhadap data-data yang diperoleh dan pada akhirnya dapat digunakan untuk pemecahan masalah sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **C. Populasi**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>14)</sup> Populasi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Perum Pegadaian di kota Tegal dan para nasabahnya. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka tidak mungkin untuk diteliti seluruh populasi, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample untuk memberi gambaran yang tepat dan benar.<sup>15)</sup>

---

<sup>14)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998.

<sup>15)</sup> Ibid

#### **D. Teknik Sampling**

Metode sample yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah purposive non random sampling yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara memilih atau mengambil subyek-subyek yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.

Adapun yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah :

- a. Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegal
- b. Nasabah Pegadaian :
  - Dua orang nasabah yang menggadaikan barang hasil kejahatan.
  - Dua orang nasabah yang pernah mengalami kerusakan atau kehilangan atas barang jaminannya yang digadaikan
  - Satu orang polisi dari Polresta Brebes

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui interview/wawancara.

Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yaitu terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman namun dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara dilakukan.

Wawancara ini dilakukan terhadap Manager Perum Pegadaian Cabang Tegal dan nasabah yang bermasalah serta seorang Polisi dari Polresta Brebes

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan ataupun karangan-karangan ilmiah dibidang hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian ini, yaitu antara lain :

- KUH Perdata
- Buku / literatur tentang gadai
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian
- *Pandhuisreglement* , Staatsblad 1928 Nomor 81
- Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian
- Petikan Putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 197 / Pid.B / 2002 / PN. Bbs
- Dan lain-lain.

## F. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Tegal. Pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah karena di Perum Pegadaian Cabang Tegal pernah terjadi kehilangan dan kerusakan barang jaminan yang digadaikan, dan juga pernah terjadi barang jaminan yang digadaikan merupakan hasil kejahatan.



## **G. Teknik Analisa Data**

Setelah terkumpul semua data yang berasal dari penelitian tentang tanggung jawab perum pegadaian dalam hal masuknya barang jaminan hasil pencurian dan penggelapan, dan juga apabila terjadi kemerosotan nilai barang jaminan atau kehilangan barang jaminan, kemudian data tersebut dipilah-pilah dan diinterpretasikan melalui bab II dalam tesis ini, dan hasilnya didiskripsikan secara kualitatif sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang memadai.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Gadai di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Tegal**

Perusahaan Umum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengurusan perusahaan.

Adapun maksud dan tujuan Perusahaan adalah :

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka perusahaan menyelenggarakan usaha :

- a. Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai

- b. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia, dan batu adi, unit toko emas dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan.<sup>16)</sup>

Kegiatan usaha lain dari Perum Pegadaian selain usaha pokok penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai adalah :

- a. Usaha Jasa Titipan

Jasa Titipan adalah fasilitas semacam "*safe deposit box*" yang ditawarkan oleh Pegadaian kepada masyarakat dengan maksud untuk melindungi surat-surat atau barang-barang berharga bila pemiliknya meninggalkan rumah dalam waktu lama atau menghendaki perlindungan yang lebih aman untuk surat-surat atau barang-barang berharga miliknya.

- b. Usaha Jasa Taksiran/Sertifikasi

Jasa Taksiran ditawarkan oleh Pegadaian kepada masyarakat dengan maksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan pemalsuan para penjual barang-barang perhiasan emas permata. Disamping itu jasa taksiran ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui kualitas barang-barang perhiasannya.

---

<sup>16)</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

c. Galeri 24 (Toko Emas Pegadaian)

Galeri 24 menyediakan perhiasan emas dengan kualitas yang benar dan desain perhiasan yang modern. Usaha ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari para pedagang emas yang menjual emas tidak sesuai dengan kadar yang sebenarnya.

d. Usaha Persewaan Gedung

Usaha Persewaan Gedung adalah upaya pemanfaatan asset secara optimal. Gedung bersejarah bekas Kantor Pusat Pegadaian diubah sedemikian rupa menjadi Auditorium Kantor Pusat dengan nama 'Gedung Langen Palikrama'. Gedung ini banyak disewa oleh masyarakat umum untuk kegiatan resepsi pernikahan, halal bihalal, seminar dan pertemuan-pertemuan lainnya. Ruangan Aula seperti ini juga disediakan pada setiap Gedung Kantor Daerah, yang digunakan untuk kegiatan perusahaan dan juga disewakan kepada masyarakat umum.

e. Usaha Penjualan Keping Emas ONH

Penjualan keping emas ONH dimaksudkan untuk melindungi nilai uang masyarakat yang ingin merencanakan ibadah Haji.

Dengan menabung emas, maka perencanaan ibadah Haji lebih terjamin.

Emas ONH adalah emas murni. Beratnya mulai dari 1 gram sampai dengan 10 gram dan harganya ditentukan berdasarkan harga emas yang berlaku pada saat transaksi. Jika sewaktu-waktu masyarakat

membutuhkan uang, emas ONH ini dapat dijual dimana saja dengan harga jual emas yang berlaku pada saat itu. Dengan demikian, emas ONH ini bukan saja baik untuk merencanakan ibadah haji, tapi juga baik untuk investasi.<sup>17)</sup>

### **1. Struktur Organisasi Kantor Cabang**

Perum Pegadaian Kantor Cabang Tegal merupakan salah satu cabang perusahaan dibawah lingkup Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Wilayah Semarang. Kantor Cabang adalah ujung tombak operasional Pegadaian yang merupakan unit penghasil perusahaan. Secara organisatoris Kantor Cabang bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah. Petunjuk-petunjuk fungsional diperoleh dari Direktorat terkait di Kantor Pusat dan dapat juga diperoleh dari Kantor Wilayah.

Struktur organisasi Kantor Cabang ditetapkan oleh Kantor Pusat sesuai dengan klasifikasinya. Klasifikasi Kantor Cabang terdiri dari :

- Kantor Cabang Kelas I
- Kantor Cabang Kelas II
- Kantor Cabang Kelas III

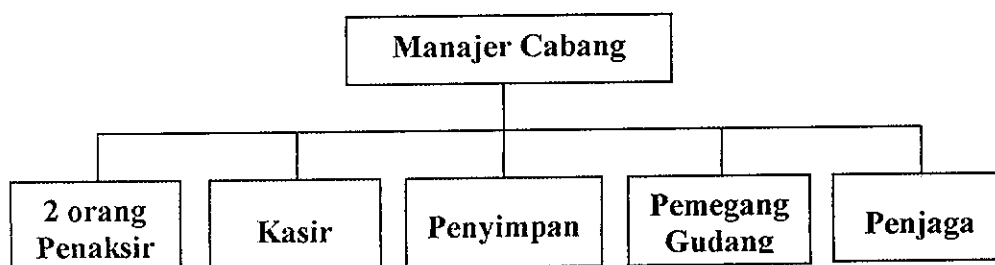
---

<sup>17)</sup> Ketut Sethyon, Pegadaian, *Menapak ke Masa Depan Dengan Kegigihan Masa Lalu*, Perum Pegadaian, Jakarta, 2002, halaman 139-144.

Klasifikasi Kantor Cabang ditentukan oleh jumlah barang jaminan yang ditangani, omzet yang dicapai, surplus dan formasi Pegawai Kantor Cabang yang bersangkutan.

Perum Pegadaian Kantor Cabang Tegal termasuk dalam Klasifikasi Kantor Cabang Kelas III dengan formasi pegawai yang terdiri dari seorang Manager Cabang, dua orang Penaksir, satu orang Penyimpan, satu orang Pemegang Gudang, satu orang Kasir dan tiga orang Penjaga. Kantor Cabang mempunyai tugas melakukan kegiatan perusahaan yang langsung berhubungan dengan masyarakat (nasabah) dalam rangka pemberian kredit gadai atau usaha lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi/Kantor Wilayah.

#### Formasi Pegawai Perum Pegadaian Cabang Tegal



Keterangan :

- Manajer Cabang

Bertugas mengelola operasional Cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain/masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

- Penaksir

Bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

- Kasir

Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang.

- Penyimpan Barang Jaminan

Bertugas mengelola gudang barang jaminan emas dengan menerima, menyimpan, merawat, mengeluarkan dan mengadministrasikan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan barang nasabah.

- Pemegang Gudang

Bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

- Penjaga

Bertugas mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

UPT-PUSTAK-UNDIP

## 2. Sasaran Kredit

Sesuai dengan maksud dan tujuan Perum Pegadaian, maka dapat diketahui bahwa sasaran kredit dari Perum Pegadaian adalah masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah, yang dapat dikelompokkan berdasarkan profesi sebagai berikut :

- Kredit untuk Petani disingkat P
- Kredit untuk Nelayan disingkat N
- Kredit untuk Pengusaha Kecil dan Menengah disingkat I
- Kredit untuk Pedagang disingkat D
- Kredit untuk Karyawan dan Pekerja disingkat K
- Kredit untuk Lain-lain disingkat L

Pengelompokkan penggunaan kredit tidak tergantung pada profesi nasabah tersebut di atas akan tetapi pada tujuan penggunaan kredit.

contoh :

- Seorang petani (P) meminta kredit untuk memperluas warung/tokonya dimasukkan ke dalam kelompok keperluan Perdagangan (D), bukan dimasukkan ke dalam kelompok keperluan Pertanian (P).
- Seorang Nelayan (N) meminta kredit untuk biaya sekolah dimasukkan ke dalam kelompok keperluan Pendidikan, bukan masuk kelompok keperluan Nelayan .



- Seorang Pedagang (D) meminta kredit untuk keperluan selamatan dimasukkan kelompok keperluan keluarga, bukan dimasukkan kelompok Perdagangan (D).
- Seorang karyawan (K) meminta kredit untuk keperluan beli pupuk dimasukkan kelompok keperluan Pertanian, bukan dimasukkan kelompok keperluan Karyawan.(K)

Meskipun demikian, dalam prakteknya di Perum Pegadaian Cabang Tegal tidak hanya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah saja yang memerlukan pinjaman, melainkan juga golongan ekonomi menengah ke atas, yang membutuhkan pinjaman untuk keperluan produktif. Hal ini dibuktikan dengan melihat jenis barang jaminan yang digadaikan, misalnya perhiasan emas, barang elektronik dan kendaraan bermotor serta mobil.

Jumlah nasabah di Perum Pegadaian Cabang Tegal setiap bulan adalah sekitar 300 sampai dengan 350 orang nasabah, dengan jumlah barang jaminan yang bisa lebih banyak dari jumlah nasabah, karena setiap nasabah belum tentu hanya memberikan satu jenis barang jaminan, melainkan bisa dua atau tiga jenis barang jaminan. Berikut adalah tabel mengenai target dan realisasi jumlah nasabah serta target dan realisasi omzet Perum Pegadaian Cabang Tegal sampai dengan bulan Juli 2003<sup>18)</sup>

---

<sup>18)</sup> Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegal, *Hasil Wawancara*, Tegal 15 September 2003

## Realisasi Jumlah Nasabah Juli 2003

Target	Realisasi s/d Juni	Realisasi Juli	Realisasi s/d Juli	%
7.097	2.107	342	2.449	34,51

Sumber : Perum Pegadaian Cabang Tegal

## Realisasi Target Omzet Bulan Juli 2003

Target 2003	Target Juli 2003	Realisasi s/d Juni 2003	Realisasi Juli 2003	Realisasi s/d Juli 2003	%	%
7.999.999.552	4.666.666.406	4.009.125.100	827.872.600	4.836.997.700	60,46	103,65

Sumber : Perum Pegadaian Cabang Tegal

### 3. Penggolongan Barang Jaminan

Barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai adalah sebagai berikut :

a. Kain, seperti :

- bahan pakaian
- kain, sarung, sprei, permadani/ambal

b. Barang perhiasan (logam dan permata), seperti :

- emas, perak, platina
- berlian
- batu mulia

c. Kendaraan, seperti :

- mobil
- sepeda motor
- sepeda

d. Barang rumah tangga, seperti :

- perabotan rumah tangga
- elektronik
- gerabah

Sedangkan barang-barang yang tidak dapat diterima sebagai barang jaminan gadai adalah :

a. Barang-barang milik Pemerintah, seperti :

- senjata api, senjata tajam
- pakaian dinas
- perlengkapan ABRI dan pemerintah

b. Barang-barang yang mudah busuk, seperti :

- makanan dan minuman
- obat-obatan
- tembakau

c. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti :

- korek api
- mercon (petasan/mesiu)
- bensin
- minyak tanah
- tabung berisi gas

d. Barang yang sukar ditaksir nilainya, seperti :

- barang purbakala
- barang historis

- e. Barang yang dilarang peredarannya, seperti :
  - Ganja, opium, madat, heroin, senjata api dan sejenisnya
- f. Barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya, seperti :
  - lukisan
  - buku
- g. Barang-barang lainnya, seperti :
  - barang yang disewa-belikan
  - barang yang diperoleh melalui hutang dan belum lunas
  - barang titipan sementara (konsinyasi)
  - barang yang tidak diketahui asal-usulnya
  - barang-barang bermasalah (barang curian, penggelapan, penipuan, dll)
  - pakaian jadi
  - bahan yang pemakainnya sangat terbatas dan tidak umum
  - ternak/binatang<sup>19)</sup>

#### **4. Penggolongan Kredit, Tingkat Sewa Modal dan Biaya Administrasi**

Pemberian Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Nasabah menyelesaikan pinjamannya kepada perusahaan (Pegadaian) sebagai pemberi pinjaman (kreditur), dengan cara

---

<sup>19)</sup> Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian

mengembalikan uang pinjaman dan membayar sewa modalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Besarnya Uang Pinjaman (UP) yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada nasabah didasarkan pada prosentase tertentu dari nilai taksiran barang-barang yang dijadikan jaminan. Makin besar nilai taksiran yang diberikan maka makin besar pula jumlah uang pinjaman.

Uang pinjaman dikelompokkan menjadi empat golongan, yakni golongan A, B, C dan D. Masing-masing golongan mempunyai plafon pinjaman yang besarnya ditentukan berdasarkan perkembangan kebutuhan pelanggan. Kebijakan tarif sewa modal ditetapkan berdasarkan perkembangan sosial dan ekonomi, yaitu bervariasi menurut besarnya uang pinjaman. Tarif sewa modal untuk pinjaman golongan A lebih kecil daripada pinjaman modal untuk pinjaman golongan B, C dan D. Perhitungan sewa modal dihitung setiap 15 hari, dimana 1 hari sampai dengan 15 hari dihitung sama dengan 15 hari penuh. Jangka waktu pinjaman semua golongan uang pinjaman ditetapkan selama 120 hari, dan setelah jatuh tempo bisa diperpanjang dengan hanya membayar jumlah uang sewa modalnya ditambah biaya administrasi yang besarnya disesuaikan dengan golongan pinjaman. Berdasarkan Surat Edaran dari Kantor Pusat Perum Pegadaian, maka terhitung mulai tanggal 1 September 2003 ditentukan peraturan yang baru mengenai besarnya uang pinjaman,

tarif sewa modal dan biaya administrasi dari setiap Surat Bukti Kredit, yaitu sebagai berikut:

Uang Pinjaman, Sewa Modal dan Biaya Administrasi per-SBK

Go l	Uang Pinjaman (per SBK)	Pembulatan	Sewa Modal per 15 hari dan max. sewa modal	Biaya Adminis trasi
	(Rp)	(Rp)		
A	20.000 s.d 150.000	500 Kebawah	1,125% max 9%	Akn. - 500 AK - 500 AG. - 500
B	151.000 s.d 500.000	1.000 Kebawah	1,625 % max 13%	BK. - 2.000 BG - 3.500
C1	505.000 s.d 1.000.000	5.000 Kebawah	1,625 % max 13%	CK. - 3.000 CG. - 5.000
C2	1.010.000 s.d 20.000.000	10.000 Kebawah	1,625 % max 13%	0,5 % x UP
D1	20.050.000 s.d 50.000.000	50.000 Kebawah	1,625 % max 13%	0,5%x UP min 15.000 Bj. Mobil min 50.000
D2	50.100.000 s.d 200.000.000	100.000 Kebawah	1,625 % max 13%	0,5% x UP Bj. Mobil min 50.000

Sumber : Perum Pegadaian Cabang Tegal

## 5. Prosedur Pemberian Kredit Gadai

Untuk memperoleh kredit gadai di Perum Pegadaian Cabang Tegal maka seorang nasabah harus memenuhi persyaratan :

- Foto Copy KTP atau kartu pengenal lain (SIM, Paspor)
- Barang jaminan yang memenuhi persyaratan
- Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan
- Mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK)
- Menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SBK)

Prosedur pemberian kredit gadai di Perum Pegadaian Cabang Tegal sangat sederhana dan tidak memerlukan administrasi yang menyulitkan, serta tidak memerlukan waktu yang lama, hanya membutuhkan waktu kurang lebih limabelas menit, dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Nasabah datang ke loket penaksiran dengan membawa barang gadai yang memenuhi syarat untuk dijadikan barang jaminan dan mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK).
- b. Nasabah kemudian menyerahkan Formulir Permintaan Kredit (FPK) dengan melampirkan KTP atau identitas lainnya dan menyerahkan barang jaminan kepada penaksir untuk ditentukan nilai taksiran dari barang jaminan tersebut.
- c. Penaksir menentukan nilai taksiran dari barang jaminan yang diserahkan nasabah dan selanjutnya menentukan besarnya Uang Pinjaman (UP) yang dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) sesuai dengan golongan kredit. SBK tersebut kemudian diserahkan kepada nasabah untuk dibawa ke loket kasir setelah ditandatangani sesuai kewenangannya.
- d. Nasabah menyerahkan SBK ke loket kasir, dan setelah diteliti keabsahan SBK tersebut, kasir melakukan pembayaran uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SBK.

## 6. Pelunasan Kredit Gadai.

Perjanjian kredit gadai berakhir pada saat nasabah melunasi hutangnya dan mengambil barang yang dijadikan jaminan.

Batas waktu maksimum pelunasan kredit gadai untuk semua golongan kredit adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari sejak adanya perjanjian kredit gadai. Apabila batas waktu maksimum pelunasan kredit telah habis, maka nasabah dapat melakukan pelunasan kredit dengan cara pelunasan penuh atau dengan pelunasan ulang gadai

### a. Pelunasan Penuh

Pelunasan penuh adalah pelunasan dari seluruh hutang nasabah yang timbul dari perjanjian kredit gadai yang terdiri dari:

#### - Pokok pinjaman

Pokok pinjaman adalah jumlah uang pinjaman yang tercantum dalam SBK dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (nasabah dan pihak Pegadaian)

#### - Sewa Modal/ Bunga

Tarif sewa modal/ bunga ditetapkan setiap 15 hari dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan (Surat Edaran) tersendiri. Jangka waktu kredit maksimum 120 hari, sejak adanya kredit gadai sampai dengan tanggal menebus atau tanggal jatuh tempo.



## b. Pelunasan Ulang Gadai

### 1. Ulang Gadai

Nasabah hendak memperbaharui kredit dengan hanya membayar bunganya saja. Untuk mengenal bahwa nasabah hanya membayar bunga/sewa modal maka pada badan SBK, kitir dalam dan kitir luar diberi tanda cap 'UG' artinya Ulang Gadai

### 2. Minta Tambah

Nasabah hendak minta tambahan uang pinjaman. Apabila besarnya uang pinjaman semula lebih kecil daripada besarnya uang pinjaman yang seharusnya, diusahakan diberikan tambahan. Untuk mengenal bahwa nasabah minta tambahan uang pinjaman, maka pada badan SBK kitir dalam dan kitir luar diberi tanda 'MT' yang artinya Minta Tambahan.

### 3. Nyicil

Nasabah hendak memperbaharui kredit dengan membayar bunga/sewa modal dan mengurangi/mencicil sebagian uang pinjaman. Jumlah cicilan ditulis pada SBK di atas uang pinjaman. Untuk mengenal bahwa nasabah melakukan cicilan, maka pada badan SBK kitir dalam dan kitir luar diberi cap 'N' yang artinya Nyicil.

#### 4. Tebus Sebagian

Nasabah hendak menebus sebagian barang jaminan rangkap dengan cara membayar bunga/sewa modal seluruhnya dan membayar uang pinjaman barang jaminan yang ingin ditebus.

Untuk mengenal bahwa nasabah melakukan penebusan sebagian barang jaminan, maka pada badan SBK kitir dalam dan kitir luar diberi cap 'TS' yang artinya Tebus Sebagian.<sup>20)</sup>

#### 7. Lelang Barang Jaminan

Lelang adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan kepada umum pada waktu yang telah ditentukan. Hak untuk melelang barang jaminan diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa.

*'Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berhutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukan suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut'*

Jika nasabah tidak melunasi pinjaman dan sewa modal atau tidak memperpanjang jangka waktu pinjamannya dan menyatakan

---

<sup>20</sup> Ibid.

agar barang jaminannya digunakan sebagai pelunasan hutangnya, maka Pegadaian terpaksa menjual barang itu dengan cara lelang. Berdasarkan Staatsblad Tahun 1933 Nomor 341, pelaksanaan lelang barang jaminan habis tempo yang ada di Pegadaian tidak lagi diselenggarakan oleh Kantor Lelang Negara melainkan diselenggarakan sendiri oleh Pegadaian. Pertimbangannya adalah bahwa pada umumnya para Manajer Cabang Pegadaian lebih mengetahui harga-harga barang jaminan yang ada di Pegadaian daripada Kepala Balai Lelang.

Lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Tegal dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sebulan, yaitu antara tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 untuk kredit tanggal 16 sampai dengan tanggal 30, dan antara tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 untuk kredit tanggal 1 sampai dengan tanggal 15.

Sebelum lelang dilaksanakan diadakan pemberitahuan terlebih dahulu mengenai lelang tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui jadwal dari pelaksanaan lelang tersebut. Pemberitahuan pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian Cabang Tegal dilakukan melalui:

- a. Pemberitahuan melalui SBK dari masing-masing nasabah.
- b. Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang
- c. Pemberitahuan melalui siaran radio
- d. Pemberitahuan oleh pegawai loket kepada nasabah

- e. Pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang jaminan yang akan dilelang, khususnya pinjaman golongan C dan D.<sup>21)</sup>

Untuk persiapan pelaksanaan lelang, maka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum lelang Manajer Cabang membentuk Team Pelaksana Lelang yang terdiri dari:

- Satu orang ketua (Manajer Cabang atau pegawai yang ditunjuk)
- Dua orang anggota (sedapat mungkin penaksir) yang bertugas sebagai petugas administrasi.

Barang-barang yang akan dilelang (kecuali barang C dan D) dikeluarkan dari tempat penyimpanannya paling cepat 5 (lima) hari sebelum lelang. Barang-barang yang telah dikeluarkan dari gudang itu kemudian dicocokkan dengan keterangan pada Surat Bukti Kredit (SBK). Untuk barang-barang golongan C dan D dikeluarkan dari tempat penyimpanannya pada hari lelang. Barang-barang tersebut kemudian diserahkan oleh penyimpan kepada Ketua Pelaksana Lelang. Apabila terdapat banyak barang jaminan C dan D yang akan dilelang, sehingga pemeriksaan tidak dapat diselesaikan pada hari akan diadakan lelang, maka pemeriksaan barang dapat dimulai 3 (tiga) hari sebelum lelang.

Semua pembayaran pada waktu lelang harus dilakukan tunai. Harga minimum lelang adalah sebesar uang pinjaman ditambah sewa

---

<sup>21)</sup> Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegal, *Hasil Wawancara*, Tegal 15 September 2003

modal maksimum, ditambah 3% biaya lelang penjual, ditambah 9% biaya lelang pembeli, dan 0,7% dana sosial atau uang miskin.

Barang-barang jaminan yang dilelang dan terjual dengan harga tinggi akan mempunyai uang kelebihan lelang, yaitu selisih antara harga lakunya lelang dikurangi dengan uang pinjaman dan sewa modal. Uang kelebihan ini dapat segera dibayarkan kepada pemilik barang setelah lelang pada hari tersebut dengan menyerahkan SBK pada petugas lelang. Jika menurut perhitungan tidak ada uang kelebihan, maka SBK dikembalikan kepada pemilik dengan diberi cap “sudah dijual, tidak ada uang kelebihan”. Menurut Aturan Dasar Pegadaian, uang kelebihan ini hanya dapat diambil oleh pemilik barang dalam jangka waktu satu tahun setelah lelang dilaksanakan. Jika sampai dengan satu tahun uang kelebihan ini belum diambil oleh pemilik barang yang dilelang, maka uang tersebut menjadi milik negara.<sup>22)</sup>

#### **B. Tanggung jawab Perum Pegadaian Dalam Hal Terjadi Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan**

Gadai merupakan jaminan terhadap benda-benda bergerak dengan menguasai bendanya oleh kreditur pemegang gadai atau dengan kata lain benda gadai harus ada pada penguasaan kreditur/ pemegang gadai. Unsur terpenting dari hak gadai adalah bahwa benda yang dijaminakan harus berada

---

<sup>22)</sup> *Op Cit*

dalam kekuasaan pemegang gadai. Namun penguasaan benda oleh pemegang gadai bukan untuk menikmati, memakai atau memungut hasil melainkan hanya untuk menjadi jaminan pembayaran hutang pemberi gadai kepada pemegang gadai.

Sebelum uang pinjaman diberikan, penaksir meneliti mutu barang yang akan dijadikan jaminan dan menghitung harga taksiran dengan berpedoman pada patokan harga dan perkembangan harga setempat juga berpedoman pada Buku Pedoman Penaksir yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat dengan menyesuaikan harga pasar. Setiap barang yang dijadikan jaminan gadai akan ditaksir lebih dahulu dengan cara antara lain:

1. Melihat contoh barang yang sama dan perkembangan harga di pasaran, misalnya untuk kain, barang pecah belah dan barang elektronik.
2. Mengetes melalui jarum penguji atau alat timbangan atau alat pengukur lainnya, misalnya untuk emas dan permata guna melihat keaslian kadar atau karat yang dimilikinya.

Dalam penaksiran nilai barang, tidak semua pegawai di Kantor Cabang diperbolehkan melakukannya. Penaksiran harus dilakukan oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan telah dididik untuk itu. Untuk mendapatkan nilai taksiran yang wajar maka dilakukan penaksiran secara berganda, yaitu oleh penaksir di depan loket dan dilanjutkan penaksiran oleh Manajer Cabang. Kemudian supaya barang yang digadaikan dapat dijual bilamana nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya, maka Perum Pegadaian menentukan standar taksiran tertinggi yang dapat ditetapkan oleh

Kantor Cabang Pegadaian. Taksiran tertinggi bagi barang-barang yang digadaikan ditetapkan berdasarkan prosentase terhadap harga yang berlaku di pasaran, yaitu sebesar 85 % dari harga pasaran setempat.

Nilai taksiran biasanya ditentukan lebih rendah dari harga pasaran setempat atas pertimbangan bahwa adanya kemungkinan barang tersebut rusak atau cacat pada waktu diterima oleh Pegadaian, juga kemungkinan terjadinya keusangan selama barang disimpan yang akan menyebabkan turunnya harga barang. Pertimbangan lain adalah kemungkinan adanya perubahan mode atau teknologi sehingga barang yang digadaikan tidak digemari lagi dan harganya menjadi turun.

Namun tidak menutup kemungkinan barang yang digadaikan mendapat nilai taksiran yang lebih tinggi dari standar atau pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terjadi jika pada saat barang diserahkan untuk digadaikan masih dalam keadaan baru. Penaksiran barang baru yang digadaikan ini tidak didasarkan pada standar yang telah ditetapkan, tetapi diserahkan pada pertimbangan dan tanggung jawab Manajer Cabang sebagai pemutus kredit.

Setelah menghitung harga taksiran, kemudian ditetapkan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan, yaitu untuk golongan A ialah maksimum 92 % dari nilai taksiran dan untuk golongan B, C, dan D ialah maksimum 88% dari nilai taksiran<sup>23)</sup>. Selanjutnya nilai taksiran dan jumlah uang pinjaman tersebut dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Di

---

<sup>23)</sup> Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegal, *Hasil Wawancara*, Tegal 15 September 2003

dalam SBK inilah perjanjian pinjam uang tersebut dituangkan. Perjanjian ini bersifat konsensual, karena dianggap sah ketika terjadi kesepakatan antara debitur dan kreditur. Dalam SBK dimuat antara lain :

1. Nama Cabang Pegadaian
2. Nama dan alamat nasabah
3. Tanggal jatuh tempo
4. Harga taksiran
5. Besarnya uang pinjaman
6. Golongan uang pinjaman
7. Keterangan Nomor barang jaminan
8. Barang jaminan
9. Tarif bunga
10. Tanda lain yang disyaratkan, misalnya cap terima/bayar, paraf dari penaksir , pemegang kas dan lain-lain.

Pada saat SBK ditandatangani dan barang jaminan diserahkan kepada Perum Pegadaian, maka barang jaminan itu menjadi tanggung jawab Perum Pegadaian sampai dengan barang jaminan itu ditebus oleh pemiliknya. Dalam hal ini, Perum Pegadaian sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap barang gadai, yaitu antara lain :

- Bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang gadai jika hal itu disebabkan karena kelalaiannya.
- Memberitahukan kepada nasabah apabila hendak menjual lelang barang gadai
- Menyerahkan kelebihan hasil penjualan lelang barang gadai kepada nasabah



- Menyerahkan barang gadai apabila nasabah telah membayar lunas hutangnya.

Berdasarkan golongan dan rubrik barang jaminan, maka penggolongan barang jaminan disusun sebagai berikut :

- Akn ..... A Kain
- AK ..... A Kantong
- AG ..... A Gudang
- BK ..... B Kantong
- BG ..... B Gudang
- CK ..... C Kantong
- CG ..... C Gudang
- DK ..... D Kantong
- DG ..... D Gudang
- DM ..... D Mobil<sup>24)</sup>

Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya /merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sehubungan dengan hal itu, Perum Pegadaian Cabang Tegal sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan.

Adapun pengamanan barang jaminan dapat berupa :

- Mengasuransikan barang jaminan
- Menyimpan ditempat yang aman dan kuat
- Melakukan penjagaan keamanan selama 24 jam

Sedangkan pemeliharaan barang jaminan dapat berupa :

- Membersihkan tempat penyimpanan/gudang
- Membersihkan barang jaminan yang kotor

---

<sup>24)</sup> *Op Cit*

- Menyimpan barang jaminan di tempat yang khusus sesuai dengan jenis barang jaminan.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya atas pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan dari nasabah, Perum Pegadaian Cabang Tegal melakukan pengelolaan terhadap barang-barang jaminan yang ada. Pengelolaan barang –barang jaminan meliputi hal-hal sebagai berikut :<sup>25))</sup>

### **1. Tempat Menyimpan Barang Jaminan**

- a. Barang emas perhiasan atau barang-barang kecil lainnya yang masuk di dalam kantong, disebut barang kantong dengan rubrik K, disimpan di dalam kamar emas (kluis/khasanah)
- b. Barang jaminan yang tidak masuk di dalam kantong disebut barang gudang dengan rubrik G, disimpan di dalam gudang.

### **2. Cara Menyimpan Barang Jaminan**

- a. Barang kantong dan barang gudang disimpan secara berkelompok menurut golongannya (A,B,C dan D) dan berurutan menurut nomornya
- b. Barang gudang dari jenis tekstil, disebut juga Kain dengan rubrik Kn, disimpan secara terpisah dari barang gudang lainnya dan disusun berurutan menurut nomer urutnya dan dikelompokkan dalam ribuan.
- c. Tiap-tiap tempat simpanan di dalam gudang harus diberi tanda dengan rubrik yang jelas.

---

<sup>25))</sup> *Op Cit*

- d. Selama tersimpan di gudang, barang jaminan harus selalu di jaga kebersihan dan keamanannya. Oleh karena itu harus di bungkus dengan alat pembungkus dari plastik dengan ketebalan 0,4 sampai 0,6 mm.
- e. Alat pembungkus dapat dipergunakan berulang-ulang.
- f. Kitir barang jaminan harus dilekatkan pada barang jaminan, bukan pada alat pembungkus
- g. Apa bila tidak ada keperluan, gudang harus selalu tertutup dan terkunci.
- h. Untuk menghindarkan kebakaran, maka di dalam gudang tidak diperkenankan merokok.
- i. Gudang tempat penyimpanan barang jaminan tidak boleh digunakan untuk menyimpan uang atau barang pribadi Kepala Cabang atau pegawai maupun orang lain.

### **3. Perlakuan Khusus Barang Jaminan**

#### **a. Kamera**

##### **1. Tempat penyimpanan :**

Tertutup (lemari kaca, peti kayu tidak lembab, ada penerangan lampu 15-40 watt non stop)

##### **2. Hal yang perlu diperhatikan :**

- Sebelum disimpan, kamera harus dilepas dari pembungkusnya

- Tidak dibungkus dengan plastik atau sejenisnya
- Kamera dibersihkan dari debu atau cairan yang melekat
- Lensa dibersihkan dengan kain pembersih lensa atau flannel

### 3. Mobil

- Tempat penyimpanan :  
Tertutup, tidak kena hujan dan panas, mobil dalam keadaan terkunci, dan apabila ada tutupnya digunakan dengan baik agar tidak kotor
- Kitir barang dan surat-surat disatukan dan ditempatkan terpisah dari barang jaminan

### 4. Petugas Gudang

- a. Petugas gudang adalah seorang pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan gudang dan semua barang yang ada di dalamnya, sesuai dengan SK penunjukan
- b. Petugas gudang yang mengelola barang kantong disebut Penyimpan
- c. Petugas gudang yang mengelola barang gudang dan barang kain disebut Pemegang Gudang
- d. Selain petugas gudang dilarang memasuki gudang tanpa ijinnya

Perum Pegadaian sebagai pemegang gadai wajib melaksanakan pengelolaan barang jaminan tersebut dengan baik, dalam arti harus memelihara dan merawat dengan baik barang jaminan milik nasabah. Oleh karena jangka waktu penyimpanan cukup lama yaitu maksimum selama 4 bulan dan masih bisa diperpanjang lagi, ada kalanya barang

yang dijadikan jaminan mengalami perubahan bentuk dan nilai. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Perum Pegadaian harus memeriksa terlebih dahulu barang-barang yang akan dijadikan jaminan. Hasil pemeriksaan terhadap keadaan dan kondisi barang jaminan tersebut kemudian dituangkan dalam Formulir Permintaan Kredit dengan disaksikan oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila di kemudian hari nasabah melunasi kreditnya dan mengambil barang jaminannya, maka berita acara tersebut dapat dijadikan tolak ukur tentang keadaan barang pada waktu diserahkan untuk jaminan gadai.

Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bagi Perum Pegadaian, seperti terjadinya kehilangan atau kecurian, kebakaran, banjir atau sebab-sebab lain yang terletak pada batas kewenangan menjaga dari pejabat pegadaian atau yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka Perum Pegadaian telah mengasuransikan seluruh barang jaminan yang ada pada PT. Asuransi Jasa Indonesia ( PT. Jasindo ). Premi asuransi dibayar oleh perusahaan dan tidak dibebankan kepada nasabah. Nasabah hanya dibebani dengan biaya administrasi yang besarnya disesuaikan dengan jumlah pinjaman.<sup>26)</sup>

Ganti kerugian atas barang jaminan dapat dibayarkan kepada nasabah setelah ada klaim dari nasabah, dengan ketentuan sebagai berikut :

---

<sup>26)</sup> Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegal, *Hasil Wawancara, Tegal 15 September 2003*

- Apabila barang jaminan hilang / habis terbakar, maka besar ganti rugi adalah  $125 \% \times$  taksiran barang jaminan.
- Apabila barang jaminan rusak dan nasabah tidak mau menebus barang jaminan tersebut, maka besar ganti rugi adalah  $125 \% \times$  nilai taksiran dan barang diserahkan pada PT. Jasindo.
- Apabila barang jaminan rusak sebagian dan nasabah mau menebusnya, maka besar ganti rugi adalah :

Besar taksiran semula	Rp. x
Besar taksiran barang jaminan yang rusak	Rp. y
Beda taksiran	Rp. $x - y$
Besar ganti rugi adalah	$125 \% \times (x - y)$ .

Dengan adanya biaya administrasi yang dibebankan pada nasabah ini, maka Perum Pegadaian berkewajiban menjaga dan memelihara dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab terhadap barang jaminan, baik kebersihannya, keutuhannya, kelengkapan peralatannya, keamanannya dan lain-lain, sehingga kondisi barang pada saat ditebus sama dengan kondisi pada saat digadaikan.

Dalam praktek di Perum Pegadaian ada kemungkinan pada waktu pelunasan kredit, barang jaminan yang akan diambil oleh nasabah ternyata rusak yang disebabkan karena kelalaian petugas, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah yang bersangkutan. Kasus yang pernah terjadi di Perum Pegadaian Tegal adalah sebagai berikut :

Seorang nasabah bernama ibu Kalimah menggadaikan sebuah video CD Player dan mendapatkan uang pinjaman sejumlah Rp. 100.000,- yang diterimanya dari Perum Pegadaian Tegal. Setelah lewat

waktu empat bulan nasabah tersebut tidak melunasi uang pinjamannya, maka terpaksa pihak Pegadaian melelang barang jaminan tersebut. Pada saat lelang, VCD tersebut laku seharga Rp. 150.000,-, akan tetapi pada saat dicoba oleh pembeli lelang, ternyata optik VCD rusak, sehingga pembeli batal membelinya. Karena tidak laku dalam lelang, VCD tersebut menjadi Barang Sisa Lelang dan dibeli oleh perusahaan seharga Rp. 112.000,-. Pihak Pegadaian kemudian memperbaiki VCD itu dan mengeluarkan biaya perbaikan sejumlah Rp. 50.000,-. Pada saat lelang berikutnya, VCD tersebut laku dengan harga Rp. 125.000,-.

Dalam kasus tersebut di atas, tindakan yang dilakukan oleh Pegadaian dalam hal terjadi kerusakan barang jaminan adalah segera memperbaikinya, dan ongkos perbaikan ditanggung oleh Pegadaian.

Menurut seorang nasabah yang pernah mengalami kerusakan barang jaminan yaitu bapak Salam, pihak Pegadaian cukup bijaksana dalam menyelesaikan kasus kerusakan terhadap barang jaminan, dan tidak menyalahkan atau melemparkan tanggung jawab kepada pemilik barang jaminan, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut sebatas bukan kerusakan fisik misalnya jatuh atau pecah oleh nasabah, dan kerusakan tersebut harus segera dilaporkan kepada pihak Pegadaian.<sup>27)</sup>

Kerusakan yang terjadi terhadap barang-barang jaminan biasanya hanyalah kerusakan kecil yang disebabkan karena lamanya waktu penyimpanan, sehingga barang jaminan menjadi berdebu dan kotor, dan juga karena barang elektronik tidak dipergunakan dalam waktu yang cukup lama, sehingga kabel-kabelnya rusak atau lengket

---

<sup>27)</sup> Hasil Wawancara, Tegal 18 September 2003

yang dapat mengakibatkan kerusakan pada barang jaminan tersebut. Dalam hal terjadi kerusakan-kerusakan yang demikian, pihak Pegadaian mempunyai anggaran khusus untuk biaya perbaikan barang-barang jaminan yang rusak, sehingga nasabah tidak dirugikan

Selain itu, ada kemungkinan juga bahwa barang pelunasan yang akan diambil oleh nasabah ternyata hilang. Menurut Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegal, hilangnya barang jaminan yang akan diambil oleh nasabah biasanya bukan karena barang itu memang hilang atau dicuri orang, melainkan biasanya disebabkan oleh kesalahan petugas dalam mengeluarkan barang gadai. Barang jaminan yang akan diambil oleh nasabah yang bersangkutan ternyata telah dikeluarkan sebelumnya oleh petugas dan diserahkan kepada nasabah lain. Nasabah lain yang menerima barang jaminan yang salah tadi juga tidak berusaha mengembalikan atau memberitahukan kepada pihak Pegadaian. Di lain pihak, Pegadaian juga sudah berusaha mencari keberadaan dari nasabah tersebut tetapi mengalami kesulitan karena alamat tidak jelas atau sudah pindah ke alamat lain dan tidak dapat ditemukan.

Kasus kehilangan yang pernah terjadi di Perum Pegadaian Tegal adalah terhadap barang jaminan yang berupa kain batik. Karena corak dan warna kain batik pada umumnya hampir sama satu dengan yang lain, maka bisa terjadi barang jaminan yang diserahkan kembali kepada nasabah setelah pelunasan, tertukar dengan barang jaminan milik orang lain yang corak dan warnanya hampir sama. Dalam kasus ini nasabah yang bersangkutan yang bernama ibu Dariyah juga kurang memperhatikan barang jaminan yang diterimanya, sehingga dia tidak



mengetahui kalau barang itu salah. Kehilangan ini baru disadari beberapa minggu kemudian ketika nasabah pemilik barang jaminan yang salah dikeluarkan yaitu ibu Kasmi, datang untuk melunasi pinjamannya dan mengambil barang jaminannya. Petugas tidak dapat menemukan barang jaminan milik ibu Kasmi tersebut, dan setelah diperiksa ternyata barang jaminan milik ibu Kasmi sudah diserahkan kepada nasabah lain yaitu ibu Dariyah. Selanjutnya pihak Pegadaian segera menghubungi dan mencari alamat ibu Dariyah untuk mengambil kembali barang jaminan yang salah diterimanya dan menukarnya dengan barang milik ibu Dariyah tersebut, kemudian barang yang salah tadi diserahkan kepada ibu Kasmi.

Dalam kasus tersebut diatas, seandainya alamat ibu Dariyah tidak dapat ditemukan, atau pindah alamat yang tidak diketahui oleh Pegadaian, maka oleh Perum Pegadaian barang jaminan tersebut dinyatakan hilang, dan selanjutnya kesalahan tersebut dicatat dalam buku barang jaminan yang salah dikeluarkan. Kemudian barang pelunasan yang tertinggal dicari dan diberi tanda oleh pemegang gudang dihadapan Manajer Cabang , dan diberi secarik kertas yang berisi nomor dan bulan kredit dari barang yang salah dikeluarkan serta diberi catatan "Tertinggal, salah dikeluarkan". Pemegang gudang memberikan tanda tangan pada buku barang yang salah dikeluarkan, dan selanjutnya barang disimpan kembali.

Apabila barang pelunasan yang telah dikeluarkan tersebut akan dilunasi, maka Perum Pegadaian akan meminta kepada nasabah untuk menunggu selama beberapa waktu, biasanya sekitar satu minggu tanpa dipungut sewa modal. Selama waktu menunggu itu pihak Perum Pegadaian berusaha mencari barang yang salah dikeluarkan itu, dan disamping itu pihak Pegadaian juga menunggu kemungkinan barang jaminan itu dikembalikan oleh nasabah yang keliru menerima barang jaminan. Jika sampai beberapa waktu barang yang salah dikeluarkan belum diketemukan, maka Pegadaian akan memberi ganti kerugian kepada nasabah dengan cara mengganti barang yang hilang dengan barang lain yang sejenis dengan corak dan warna yang hampir sama dengan barang yang hilang, sehingga nasabah tidak dirugikan. Selanjutnya barang jaminan yang tertinggal akan dilelang oleh Pegadaian, dan hasilnya digunakan untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan oleh Pegadaian untuk mengganti barang yang hilang tadi

Menurut ibu Kasmi, nasabah yang mengalami kehilangan barang jaminan, pihak Pegadaian sangat tanggap dan bertanggung jawab dalam menangani kasus barang jaminan yang salah dikeluarkan. Pegadaian berusaha mencarikan barang milik nasabah tersebut sampai ketemu, dan seandainya sampai tidak dapat ditemukan, maka Pegadaian akan mengganti dengan barang yang sejenis, sehingga dalam hal ini nasabah tidak merasa dirugikan.<sup>28)</sup>

---

<sup>28)</sup> Hasil Wawancara, 18 September 2003

### **C. Tanggung Jawab Perum Pegadaian Terhadap Barang Jaminan Yang Berasal Dari Kejahatan ( Pencurian atau Penggelapan )**

Kredit gadai adalah fasilitas pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang sangat sederhana, mudah, cepat dan tidak memerlukan administrasi yang menyulitkan. Untuk mendapatkan kredit gadai, seorang calon nasabah cukup menyerahkan barang jaminan yang dimilikinya kepada Perum Pegadaian, dan setelah barang jaminan itu ditaksir oleh petugas, maka akan diberikan uang pinjaman sejumlah tertentu berdasarkan prosentase dari nilai taksiran barang jaminan. Kesederhanaan prosedur ini dapat menimbulkan konsekuensi logis, yaitu kemungkinan adanya suatu masalah apabila barang jaminan yang digadaikan ternyata bukanlah milik nasabah yang bersangkutan, tetapi milik pihak ketiga yang diperoleh dari hasil pencurian atau penggelapan, dan pemilik sebenarnya menuntut pengembalian dari Pegadaian.

Menurut Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegal, dalam menerima barang jaminan, Perum Pegadaian tidak mempermasalahkan mengenai asal dari barang jaminan tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara yang menentukan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak maka dianggap sebagai pemiliknya. Jadi Perum Pegadaian menduga, bahwa siapapun yang datang ke Perum Pegadaian dengan membawa barang jaminan untuk digadaikan adalah sebagai pemilik sebenarnya dari barang tersebut. Pegadaian dalam menerima barang jaminan selalu didasarkan pada itikad baik. Ukuran itikad

baik disini adalah bahwa Pegadaian menduga, pemberi gadai atau nasabah adalah pemilik sebenarnya dari barang jaminan dan hak pemberi gadai itu tidak disangsikan lagi.

Dalam pelaksanaan gadai, ukuran itikad baik menjadi faktor penting dalam hal perjanjian gadai antara pihak yang berutang dan yang berpiutang. Untuk itu dalam pemberian kredit gadai Perum Pegadaian mengharuskan debitur/nasabah untuk melampirkan identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk. Benda-benda yang digadaikan juga harus memenuhi standar dan persyaratan formalitas, yaitu harus mempunyai sertifikat atau surat bukti kepemilikan. Untuk barang-barang jaminan berupa kendaraan bermotor atau mobil harus mempunyai bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK, dan untuk benda-benda lain seperti emas, benda elektronik, sepeda dan lain-lain adalah dengan menunjukkan kuitansi pembeliannya. Mengenai bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau mobil berupa BPKB dan STNK, pihak Pegadaian sebelumnya harus lebih dahulu meneliti dengan baik yaitu dengan cara mengecek ke kantor Samsat terkait untuk mempertegas bukti kepemilikan dan untuk mencegah pemalsuan. Apabila benda gadai bukan kepunyaan debitur sendiri tetapi milik orang lain, dan debitur hanya sebagai wakil dari pemilik benda gadai, maka pihak Pegadaian mengantisipasinya dengan cara meminta debitur untuk membawa surat kuasa dari pemilik barang. Surat kuasa ini harus ditandatangani oleh pemilik barang dan juga oleh debitur sendiri.

Meskipun pihak Perum Pegadaian telah berusaha mengantisipasi segala kemungkinan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi dalam kenyataannya masih dimungkinkan adanya benda gadai yang masuk ke Pegadaian yang berasal dari hasil kejahatan ( pencurian atau penggelapan ). Walaupun prosentasenya sangat kecil atau bisa dikatakan jarang sekali terjadi, tapi pihak Pegadaian tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan terhadap benda gadai yang berasal dari kejahatan. Dalam praktek memang sulit untuk mengetahui tentang kebenaran status benda gadai yang diserahkan pada Perum Pegadaian, karena surat bukti kepemilikan atau identitas diri bisa saja dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>29)</sup>

Apabila benda gadai yang berasal dari hasil kejahatan ini masuk ke Pegadaian dan tidak ada laporan dari pihak ketiga yang merasa kehilangan atas benda gadai tersebut, maka perjanjian gadai tetap sah dan berlaku seperti biasanya. Dalam hal ini pihak Pegadaian tidak mengetahui asal dari benda yang digadaikan. Pegadaian dalam menerima barang jaminan selalu berdasar pada ukuran itikad baik. Permasalahan baru timbul apabila pemilik sebenarnya dari benda gadai menuntut pengembalian benda tersebut dari Pegadaian, atau melaporkan kejahatan tersebut ke polisi, dan kemudian setelah polisi dapat menangkap pelaku kejahatan tadi, si pelaku memberitahukan bahwa barang yang diperolehnya dari hasil kejahatan sudah digadaikan.

---

<sup>29)</sup> Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegal , *Hasil Wawancara*, Tegal, 18 September 2003

Mengenai benda gadai yang berasal dari kejahatan, baik pencurian maupun penggelapan, ada perbedaan dalam cara memperoleh benda tersebut. Menurut Pasal 362 KUHPidana, yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHPidana, yaitu suatu perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kepercayaan orang lain. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa benda gadai yang berasal dari pencurian diperoleh dengan cara melawan hukum, jadi tidak melalui penyerahan secara sukarela dari pemilik barang, sedangkan benda gadai yang berasal dari penggelapan biasanya diperoleh dengan melalui penyerahan secara sukarela dari pemilik barang.

Menurut Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegal, permasalahan mengenai benda gadai yang berasal dari hasil pencurian pernah terjadi di Perum Pegadaian Cabang Tegal, yaitu pada bulan September tahun 2002. Pada saat itu pihak Pegadaian tidak mengetahui kalau benda gadai yang diserahkan pada Pegadaian adalah barang curian, karena identitas nasabah dan surat-surat lain yang diperlukan dalam pemberian kredit gadai telah dipenuhi oleh nasabah. Di sini terlihat bahwa sudah ada itikad baik dari debitur atau nasabah yaitu dengan menyerahkan bukti identitas diri, sehingga pihak Pegadaian bisa menduga bahwa debitur tersebut adalah pemilik dari benda gadai.

Adapun kasusnya adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 20 September 2002 seorang nasabah bernama Nyonya Hermin Wijayanti datang ke kantor Perum Pegadaian Cabang Tegal dengan maksud untuk meminta kredit gadai. Nasabah tersebut membawa barang jaminan yang akan digadaikan berupa satu unit pompa air merek Honda. Setelah semua syarat-syarat yang diperlukan dipenuhi oleh nasabah, yaitu kartu identitas diri dan bukti kuitansi pembelian barang, maka barang jaminan itu kemudian ditaksir oleh petugas penaksir dan diperoleh nilai taksiran sebesar Rp. 629.000,- dan selanjutnya berdasarkan nilai taksiran itu, nasabah memperoleh uang pinjaman sebesar Rp. 550.000,-.

Beberapa hari kemudian, nasabah tersebut datang kembali ke kantor Perum Pegadaian bersama dengan seorang polisi dan pemilik sebenarnya dari benda gadai. Polisi itu memberitahukan bahwa benda gadai yang diberikan oleh Nyonya Hermin Wijayanti yaitu berupa satu unit pompa air merek Honda adalah barang hasil pencurian, dan pencurinya sudah tertangkap oleh polisi, yaitu suami Nyonya Hermin yang bernama Raun Prayitno bin Mukrad.

Dalam kasus ini, setelah Pegadaian menerima laporan dari polisi dan pemilik benda gadai, maka Pegadaian segera mencari benda gadai yang dimaksud di gudang penyimpanan, dan memberi tanda pada barang tersebut bahwa barang tersebut adalah barang polisi.

Pihak kepolisian kemudian membuat surat permohonan resmi untuk menyita barang jaminan itu sebagai alat bukti bagi pemeriksaan tersangka.

Namun demikian, polisi tidak dapat begitu saja menyita barang tersebut. Untuk dapat menyita barang jaminan yang ada di Pegadaian, harus ada penetapan lebih dahulu dari Pengadilan Negeri, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi di sini yang berhak menyita adalah pejabat polisi dengan seijin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pegadaian sebelumnya juga meminta kepada polisi agar bersedia melakukan penyitaan di tempat (Sita Di Tempat), dengan alasan Pegadaian sebagai lembaga milik negara dapat menjamin keamanan barang sitaan, dan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk keperluan persidangan, Pegadaian dengan senang hati akan menunjukkan barang sitaan itu ke Pengadilan.

Apabila polisi setuju dengan permintaan sita di tempat ini, maka barang jaminan yang hendak disita harus di foto terlebih dahulu, dan dilampirkan dalam Berita Acara Penyitaan barang jaminan dari kepolisian. Berita Acara Penyitaan ini di buat rangkap dua, yang ditandatangani oleh polisi sebagai penyidik dan oleh Manajer Cabang, dan dalam Berita Acara ini antara lain menyebutkan bahwa barang sitaan tersebut dititipkan di Pegadaian. Barang jaminan yang disita itu kemudian disimpan di tempat yang aman dan dibukukan dalam Buku Barang Polisi.

Akan tetapi dalam kasus ini, polisi menolak untuk melakukan penyitaan di tempat. Menurut Bripka Suparno, penyidik dari Kepolisian Resort Brebes yang menangani kasus ini, alasan ditolaknya permintaan sita di tempat tersebut adalah bahwa dikhawatirkan tersangka atau pihak yang menguasai barang (Perum Pegadaian) akan merusak, menghilangkan atau



memindahkan barang bukti, sehingga untuk menghindari hal itu, barang jaminan yang akan dijadikan barang bukti harus dibawa oleh polisi.

Dalam menghadapi aparat penyidik ini, langkah-langkah yang diperlukan oleh pihak Pegadaian adalah :

1. Memberikan penjelasan kepada aparat kepolisian bahwa Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara yang dalam kegiatan operasionalnya mendasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menerima barang yang berasal dari kejahatan sebagai jaminan kredit.
2. Menanyakan surat tugas dari aparat penyidik yang bersangkutan dan surat untuk melakukan penyitaan barang yang akan dijadikan alat bukti.
3. Menjelaskan bahwa Pegadaian mempunyai itikad baik dalam proses kredit gadai.
4. Menginformasikan bahwa Pegadaian mendasarkan pada ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara, dimana orang yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya, sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikannya.
5. Meminta agar sebaiknya barang jaminan dilunasi terlebih dahulu oleh si tersangka atau pihak lain, khususnya nasabah yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 1977 KUHPerdara.
6. Menjelaskan bahwa bila barang akan disita sebaiknya tetap disimpan di Pegadaian (sita di tempat), sebab dijamin aman, tidak rusak, hilang atau dipindahtangankan.

7. Apabila aparat penyidik tetap bersikeras memaksa membawa barang bukti untuk disimpan di instansinya, sebaiknya dipenuhi persyaratan administrasinya dengan mengisi blangko (form) yang tersedia.
8. Meminta salinan hasil BAP yang telah ditandatangani sebagai pedoman dalam memberikan kesaksian di Pengadilan.
9. Secara rutin memonitor tindak lanjut penyelesaian kasusnya

Oleh karena aparat penyidik tetap bersikeras memaksa membawa barang bukti untuk disimpan di instansinya, maka setelah dipenuhi semua persyaratan yang diperlukan, barang jaminan hasil kejahatan tersebut kemudian disita oleh polisi.

Menurut Bripka Suparno, dalam penanganan kasus barang jaminan hasil dari kejahatan ini, pihak Pegadaian sangat membantu dan dapat bekerjasama dengan kepolisian, sehingga kasus-kasus tersebut dapat segera diselesaikan.<sup>30)</sup>

Sementara itu, pihak Pegadaian tetap berusaha agar barang jaminan itu bisa segera dilunasi oleh nasabah yang bersangkutan, yaitu Nyonya Hermin Wijayanti, dengan cara mendatangi rumahnya, memberikan surat peringatan atau memanggil nasabah ke Pegadaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :

*'Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam*

---

<sup>30)</sup> Bripka Suparno, *Hasil Wawancara*, Kepolisian Resort Brebes

*gadai, dengan tidak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali'*

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemegang gadai dalam hal ini pihak Pegadaian dilindungi terhadap pemberi gadai yang tidak wenang menguasai benda gadai, sehingga perjanjian gadai tetap sah, walaupun kemudian si pemberi gadai dibuktikan sebagai yang tidak berhak untuk memberikan barang itu sebagai tanggungannya, hal itu tidak boleh dipertanggung jawabkan kepada pemegang gadai.

Menurut Nyonya Hermin Wijayanti, debitur dalam kasus tersebut di atas, pihak Pegadaian telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan dan surat panggilan agar dirinya datang ke Pegadaian, dan juga beberapa kali petugas Pegadaian datang ke rumahnya secara baik-baik untuk menanyakan masalah pembayaran uang pinjamannya ke Pegadaian. Namun oleh karena keadaan keluarganya tidak mampu dan suaminya sedang berada di tahanan karena kasus pencurian tersebut, maka dia tidak dapat melunasi uang pinjamannya ke Pegadaian.<sup>31)</sup>

Namun demikian apabila pemegang gadai beritikad buruk dalam arti memberikan peluang kepada pihak tertentu untuk menerima barang-barang gadai yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka dalam hal ini yang dilindungi adalah pemilik sebenarnya (*eigenaar*). Ketentuan mengenai perlindungan terhadap pemilik sebenarnya dari barang gadai terdapat dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPdata yang menyebutkan bahwa :

---

<sup>31)</sup> Hasil Wawancara, 20 September 2003

*'Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, didalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582'*

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap pemilik sebenarnya (*eigenaar*) dengan menuntut pengembalian barang berlaku dalam jangka waktu tiga tahun sejak ia kehilangan barang tersebut, dengan tidak mengurangi hak pemegang gadai untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barang tersebut.

Selanjutnya Pasal 582 KUHPerdato menyebutkan bahwa :

*Barang siapa menuntut kembalinya sesuatu kebendaan yang telah dicuri atau dihilangkan, tidak diwajibkan memberi penggantian yang memegangnya untuk uang yang telah dibayarkannya guna membelinya, kecuali kebendaan itu dibelinya di pasar tahunan atau pasar lainnya dari seorang pedagang yang terkenal sebagai seorang yang biasanya memperdagangkan barang-barang sejenis itu'*

Pemilik barang apabila akan merevindikasi atau menuntut pengembalian barang miliknya harus memperlihatkan bukti kepemilikan berupa kuitansi pembelian yang asli atau surat-surat lainnya, dan pemilik barang tidak harus membayar kepada pihak Pegadaian, karena pemilik barang dalam hal ini tidak terlibat dalam perjanjian gadai antara kreditur dan debitur. Perjanjian gadai antara kreditur dan debitur akan berakhir dengan keluarnya barang jaminan dari pemegang gadai, dan sebagai gantinya pihak Pegadaian dapat meminta kepada debitur untuk melunasi hutangnya. Dalam hal ini, pihak kreditur (Pegadaian) tetap berhak untuk

menuntut ganti rugi kepada debitur untuk mengembalikan uang pinjaman beserta sewa modalnya, sehingga pihak Pegadaian tidak dirugikan.

Menurut Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegal, penyelesaian masalah barang jaminan hasil curian melalui jalur hukum ini adalah sebagai upaya untuk membuktikan kepemilikan atas barang jaminan tersebut, dan bahwa pemberi gadai adalah tidak berhak memberikan barang itu sebagai jaminan gadai, sehingga putusan Pengadilan akan dapat menentukan proses pengembalian barang tersebut.

Dalam kasus ini, langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh Perum Pegadaian Cabang Tegal adalah sebagai berikut :

- Selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar barang bukti yang diserahkan oleh Pegadaian selalu disimpan dengan baik dan menjadi tanggung jawab kepolisian.
- Meminta kepada pihak kepolisian agar perkara tersebut segera diproses dan diajukan ke Penuntut Umum dan ke persidangan sehingga mendapat keputusan hukum yang tetap.
- Mengirimkan satu orang penaksir barang jaminan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan penjelasan-penjelasan seputar tata cara penaksiran barang di Pegadaian.
- Selalu membantu dan mengikuti proses penyelesaian perkara tersebut sampai mendapatkan keputusan hukum yang tetap.

Kasus ini mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 16 Desember 2002. Dalam persidangan tersebut pihak Pegadaian

diajukan sebagai saksi, yang diwakili oleh seorang penaksir barang jaminan. Sebagai saksi, pihak Pegadaian wajib memberi kesaksian dan dilakukan di bawah sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

Mengingat Majelis Hakim dalam meminta keterangan berpedoman kepada hasil Berita Acara Pemeriksaan, maka dalam menjawab setiap pertanyaan di persidangan, pihak Pegadaian harus tetap konsisten mengacu pada hasil BAP. Apabila kesaksian yang diberikan ternyata dapat dibuktikan tidak benar (kesaksian palsu), maka pihak Pegadaian akan menghadapi resiko tuntutan pidana sesuai Pasal 242 KUHPidana tentang sumpah palsu dan keterangan palsu, yang diancam dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.

Dalam kapasitasnya sebagai saksi, pihak Pegadaian memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Menjelaskan bahwa prosedur permintaan kredit telah dilakukan sebagaimana mestinya
2. Telah berupaya meminta keterangan tentang kepemilikan barang dari nasabah yang bersangkutan dan menurut pengakuannya telah memberikan penjelasan yang sebenarnya (dibuktikan dengan surat pernyataan kepemilikan)
3. Bahwa Pegadaian dalam menetapkan pemberian kredit didasarkan kepada itikad baik nasabah dalam memberikan informasi yang benar.
4. Pegadaian tidak mempunyai alasan untuk menolak kreditnya karena berkesimpulan bahwa nasabah yang bersangkutan adalah pemilik barang yang sah.

Dalam proses persidangan, ada kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepada pihak Pegadaian mengarah pada kemungkinan adanya perbuatan penadahan yang dilakukan oleh Pegadaian. Dalam hal ini pihak Pegadaian menjelaskan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai penadah apabila terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu pada saat menerima barang gadai telah diketahuinya bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan (pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan dan lain-lain). Sedangkan kejadian yang ada di Pegadaian adalah bahwa pada saat barang digadaikan, nasabah telah memberikan penjelasan, menunjukkan bukti kepemilikan dan memberikan pernyataan, sehingga Pegadaian berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah milik nasabah yang bersangkutan. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pihak Pegadaian tidak dapat dikatakan sebagai penadah.

Selanjutnya mengenai penyelesaian barang bukti di Pengadilan, diserahkan kepada putusan hakim dalam persidangan. Menurut petunjuk-petunjuk umum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 92 / 1139 / S tanggal 15 Juli 1941 jo Aturan Dasar Pegadaian Pasal 14 ayat (2) Vide Pedoman Operasional Kantor Cabang Bab III. D. 14, putusan Pengadilan bisa berupa :

- Barang jaminan yang menjadi tanda bukti dalam suatu perkara hukum pidana oleh hakim hanya boleh diperintahkan pengembaliannya kepada yang dianggap berhak dengan tidak membayar uang pinjaman dan sewa modal, dalam hal barang itu diperoleh dari perbuatan-perbuatan pencurian, penipuan, pemerasan dan paksaan.

- Barang jaminan bekas tanda bukti dalam suatu perkara penggelapan yang diperoleh dari perbuatan yang tidak dapat dihukum, karena waktu melakukan penggelapan barangnya telah ada dalam kekuasaan pelaku kejahatan, tidak dapat dikembalikan kepada yang dianggap berhak dengan cuma-cuma, maka barang itu harus dilunasi seperti biasa.
- Barang sisa lelang (BSL) tanda bukti, yang menurut keputusan hakim harus diserahkan kepada yang berhak, hanya dapat diberikan setelah yang bersangkutan membayar kepada Pegadaian ongkos pembeliannya (uang pembelian dan ongkos menurut Register Barang Sisa Lelang).

Setelah melalui proses persidangan, putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan dalam kasus ini adalah memerintahkan agar barang bukti berupa satu unit diesel pompa air merek Honda dikembalikan kepada pemilik barang yang sebenarnya, yaitu Mukhrodin bin Rastim.

Dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu, maka pihak Pegadaian harus merelakan barang bukti diserahkan kepada pemilik barang yang sebenarnya. Dalam hal ini Pegadaian mengalami kerugian karena barang gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai sebelum ada pelunasan kredit gadai. Ketentuan Pasal 1152 ayat (3) menjelaskan bahwa hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai. Meskipun hak gadai sudah hapus karena barang gadai dikembalikan kepada pemilik sebenarnya, tapi pihak Pegadaian tetap berhak untuk menuntut ganti rugi kepada debitur agar debitur melunasi uang pinjaman beserta sewa modalnya. Hak untuk



menuntut ganti rugi ini didasarkan pada isi perjanjian kredit antara debitur dengan pihak Pegadaian yang dituangkan dalam Surat Bukti Kredit, yang pada hakekatnya merupakan surat pengakuan hutang dari pihak debitur kepada kreditur. Dengan demikian, SBK merupakan bukti yang kuat mengenai telah terjadinya perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur. Apabila debitur tetap tidak mau melunasi pinjamannya, maka pihak Pegadaian dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan agar debitur segera melunasi pinjamannya.

Menurut Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegal, dalam kasus ini pihak Pegadaian sudah berusaha meminta pelunasan hutang kepada nasabah yaitu Nyonya Hermin Wijayanti dengan berbagai cara, tapi hal itu tidak mendatangkan hasil. Keadaan dan kondisi debitur ternyata tidak memungkinkan untuk membayar atau melunasi hutangnya, karena debitur hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan dan keadaannya sangat memprihatinkan, sedangkan suaminya yaitu tersangka pencuri barang jaminan tersebut sudah tertangkap polisi dan berada dalam tahanan, sehingga tulang punggung keluarga otomatis sudah tidak bisa diharapkan lagi.

Sebetulnya pihak Pegadaian dapat menggunakan cara lain yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan agar debitur mau melunasi hutangnya, tapi hal tersebut tidak dilakukan. Alasan Pegadaian tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan antara lain adalah karena debitur adalah orang yang tidak mampu sehingga tidak mungkin untuk melunasi hutangnya, dan pertimbangan lain adalah karena biasanya untuk berperkara di Pengadilan

membutuhkan biaya yang besar yang jumlahnya bisa melebihi jumlah uang pinjaman.

Dengan keadaan seperti ini, maka Pegadaian mengambil kebijaksanaan, yaitu mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah Pegadaian Semarang agar dapat menghapuskan uang pinjaman itu. Permohonan ini harus dilampiri dengan Petikan Putusan Pengadilan Negeri atas kasus yang bersangkutan. Kemudian atas persetujuan Kantor Wilayah Pegadaian Semarang maka Kantor Cabang Pegadaian Tegal menghapuskan uang pinjaman itu dan menjadi beban atau kerugian perusahaan.<sup>32)</sup>

Kasus lain yang terjadi di Pegadaian Cabang Tegal adalah masalah barang jaminan yang diperoleh dari hasil penggelapan. Ketentuan yang mengatur mengenai penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Jadi dalam hal ini, seseorang memperoleh sesuatu barang milik orang lain melalui penyerahan secara sukarela dari pemiliknya, dan selanjutnya orang tersebut menyalahgunakan barang yang diperolehnya itu dengan menggadaikannya ke Pegadaian.

Adapun kasusnya adalah sebagai berikut :

- Seorang ibu bernama ibu Alfiyah datang ke Kantor Perum Pegadaian Cabang Tegal untuk meminta kredit gadai dengan menyerahkan barang jaminan berupa satu unit kipas angin merek 'Maspion'. Sesuai prosedur

---

<sup>32)</sup> Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegal, *Hasil Wawancara*, Tegal 20 September 2003

pemberian kredit di Pegadaian, maka nasabah harus memenuhi persyaratan yaitu melampirkan bukti identitas diri dan bukti kuitansi pembelian barang yang digunakan sebagai jaminan gadai. Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka barang jaminan tersebut kemudian ditaksir oleh petugas penaksir, dan berdasarkan nilai taksiran tersebut diberikan sejumlah uang pinjaman kepada nasabah.

Pihak Pegadaian tidak curiga mengenai asal kepemilikan barang jaminan tersebut, karena Pegadaian menganggap siapa saja yang menggadaikan barang ke Pegadaian adalah sebagai pemilik barang. Selain itu, nasabah yaitu ibu Alfiyah juga memiliki itikad baik karena ia menyerahkan bukti identitas dirinya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kredit.

Setelah berselang waktu kira-kira satu bulan, pihak Pegadaian didatangi seseorang bernama ibu Harti yang menanyakan tentang barang jaminan berupa satu unit kipas angin merek 'Maspion' yang digadaikan oleh nasabah bernama Alfiyah. Kepada Pegadaian ibu Harti menjelaskan bahwa dia adalah pemilik sebenarnya dari barang jaminan tersebut. Beberapa waktu sebelumnya dia telah meminjamkan kipas angin itu kepada ibu Alfiyah untuk suatu keperluan, tetapi karena tidak segera mengembalikan dalam waktu yang cukup lama, maka ibu Harti mendatangi rumah ibu Alfiyah untuk mengambil kipas angin itu. Ibu Harti tidak dapat menemukan kipas angin tersebut, dan setelah ibu Alfiyah didesak terus, dia kemudian mengakui bahwa kipas angin itu sudah digadaikan di Pegadaian Cabang Tegal.

Pihak Pegadaian kemudian segera mencari barang jaminan yang dimaksud oleh ibu Harti, dan setelah ketemu kemudian barang tersebut

dikeluarkan dari gudang penyimpanan. Pihak Pegadaian meminta kepada pemilik barang supaya bermusyawarah dengan debitur mengenai penyelesaian barang jaminan itu, sehingga akan diperoleh suatu kata sepakat antara kedua belah pihak. Setelah dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak dengan disaksikan oleh pihak Pegadaian, maka diperoleh kata sepakat bahwa ibu Alfiah sebagai debitur harus melunasi hutang kepada pihak Pegadaian, dan setelah barang jaminan keluar dari Pegadaian, maka barang itu kemudian diserahkan oleh debitur kepada pemilik barang.

Penyelesaian masalah barang jaminan yang diperoleh dari hasil penggelapan biasanya diselesaikan dengan jalan musyawarah atau secara damai, yaitu dengan cara pelunasan pinjaman dan barang diserahkan kepada pemilik. Dalam kasus penggelapan, pihak Pegadaian tidak dapat dipersalahkan atau dimintai tanggung jawab, karena Pegadaian sudah melakukan prosedur yang sebenarnya dalam pemberian kredit gadai dan segala persyaratan yang diperlukan sudah dipenuhi oleh nasabah, sehingga Pegadaian dapat menganggap bahwa barang jaminan adalah milik nasabah yang bersangkutan. Selain itu, dalam masalah penggelapan, barang jaminan yang digadaikan diperoleh oleh debitur dari pemilik barang dengan melalui penyerahan secara sukarela dan tidak melalui paksaan, sehingga dalam hal ini pihak Pegadaian tidak dapat dipersalahkan.

Menurut ibu Alfiah, nasabah dalam kasus penggelapan, sebetulnya tidak ada niat untuk menggadaikan barang milik ibu Harti yang dipinjamnya, tetapi karena tiba-tiba ada kebutuhan mendadak yang harus segera dipenuhi, maka dengan terpaksa dia menggadaikan barang milik ibu Harti tersebut untuk mendapatkan uang pinjaman. Setelah temannya

meminta kembali barang miliknya, barulah dia mengakui bahwa barang itu sudah digadaikan.<sup>33)</sup>

Dengan adanya kasus-kasus yang menyangkut masalah barang jaminan yang berasal dari kejahatan ini, maka menurut Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegal, diperlukan langkah-langkah untuk menghindari kemungkinan masuknya barang gadai yang berasal dari kejahatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Meminta copy kartu identitas ( KTP/SIM ) dari nasabah
- b. Meminta surat bukti kepemilikan barang (kuitansi pembelian, STNK, BPKB, dan lain-lain) yang dinilai sah
- c. Sebaiknya agar nasabah membuat pernyataan sebagai pemilik barang di hadapan penaksir / Manajer Cabang, juga untuk pemilik kendaraan yang BPKB nya belum dibalik nama
- d. Untuk mengetahui keabsahan dokumen ( BPKB dan STNK ) maupun fisik kendaraan bermotor, sebaiknya meminta bantuan Polres untuk diadakan pemeriksaan fisik
- e. Terhadap nasabah yang bukan pemilik barang jaminan, agar membuat surat kuasa khusus bermeterai secukupnya dan melampirkan kartu identitas masing-masing pihak
- f. Apabila tidak bersedia memenuhi syarat-syarat tersebut sebaiknya ditolak saja.

---

<sup>33)</sup> Hasil Wawancara, 25 September 2003

#### D. Analisa Data

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dapat timbul dalam praktek pemberian kredit gadai di Perum Pegadaian Cabang Tegal antara lain adalah mengenai rusak atau hilangnya benda gadai yang akan dilunasi oleh nasabah, dan masalah mengenai benda gadai yang diperoleh dari hasil kejahatan yaitu pencurian atau penggelapan.

Menurut Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegal, untuk menghindari kerugian yang dapat ditimbulkan karena rusak atau hilangnya barang gadai yang disebabkan karena keadaan yang bersifat *force majeure* seperti : banjir, kebakaran, gempa bumi atau sebab-sebab lain yang terletak pada batas kewenangan menjaga dari aparat Pegadaian, maka Perum Pegadaian telah mengasuransikan seluruh barang jaminan yang ada pada PT. Asuransi Jasa Indonesia ( PT. Jasindo ). Selain kerusakan dan kehilangan benda gadai yang disebabkan oleh keadaan *force majeure* tadi, bisa juga terjadi kerusakan dan kehilangan benda gadai yang disebabkan karena kelalaian petugas dan bukan karena kesengajaan. Kerusakan yang terjadi terhadap barang-barang jaminan biasanya hanyalah kerusakan-kerusakan kecil yang disebabkan karena lamanya waktu penyimpanan, sehingga barang jaminan menjadi berdebu dan kotor. Apabila ada laporan dari nasabah mengenai adanya kerusakan ini, maka dalam hal ini, pihak Pegadaian mempunyai anggaran khusus untuk biaya perbaikan barang jaminan yang rusak, sehingga nasabah tidak akan dirugikan. Sedangkan mengenai hilangnya benda gadai, biasanya disebabkan karena kesalahan petugas dalam mengeluarkan benda gadai yang akan ditebus oleh nasabah (barang jaminan yang dikeluarkan tertukar dengan barang milik orang lain ),

dan orang yang menerima barang yang salah tersebut tidak berusaha untuk mengembalikan lagi kepada pihak Pegadaian. Dalam hal terjadi kehilangan barang jaminan ini, pihak Pegadaian akan berusaha untuk mencarinya sampai ketemu, dan apabila sudah dicari dengan berbagai cara tetapi tidak ditemukan juga, maka pihak Pegadaian akan memberikan ganti rugi kepada nasabah dengan cara memberikan barang lain yang sejenis dengan barang jaminan yang hilang. Selanjutnya barang jaminan yang tertinggal akan dijual lelang oleh Pegadaian dan hasilnya digunakan untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan oleh Pegadaian untuk mengganti barang jaminan yang hilang tadi.

Ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab pemegang gadai terhadap barang jaminan ini terdapat dalam Pasal 1157 KUHPdata yang menyatakan bahwa pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya/merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pegadaian sebagai pemegang gadai berkewajiban untuk memelihara dan merawat benda gadai dengan baik, sehingga tidak akan terjadi kehilangan dan kemerosotan barang gadai atau kerusakan barang gadai milik nasabah. Sebagai imbalan terhadap kewajiban tersebut, pemegang gadai berhak untuk memperhitungkan ongkos terhadap pemilik benda gadai, yaitu berupa biaya administrasi. Dengan adanya biaya administrasi yang dibebankan kepada pemilik benda gadai ini, maka Perum Pegadaian berkewajiban menjaga dan memelihara dengan baik dan penuh tanggung jawab terhadap barang jaminan, baik kebersihannya, keutuhannya, kelengkapan peralatannya, keamanannya dan lain-lain, sehingga kondisi barang pada saat ditebus sama dengan kondisi pada saat digadaikan.

Oleh karena kasus kerusakan maupun kehilangan barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Tegal sangat jarang sekali terjadi, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Perum Pegadaian telah dapat memenuhi kewajibannya untuk menjaga dan memelihara barang jaminan dengan baik, dan dalam hal terjadi masalah kerusakan atau kehilangan barang jaminan seperti tersebut diatas, pihak Pegadaian dapat memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1157 KUHPerdara, yaitu dengan cara memperbaiki kerusakan barang jaminan dan mengganti barang jaminan yang hilang atau salah dikeluarkan.

Penulis sependapat mengenai ganti rugi yang diberikan kepada nasabah dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan ini, hanya saja pihak Pegadaian hendaknya berusaha dengan baik untuk menjaga dan merawat barang jaminan yang ada sehingga nasabah tidak akan dirugikan dan nasabah akan lebih percaya terhadap Perum Pegadaian

Untuk masalah benda gadai yang berasal dari hasil pencurian dan penggelapan, hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur atau pemegang gadai. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1152 ayat (4) yang menyatakan bahwa :

*'Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang, yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali'*

Dengan demikian, Pegadaian sebagai pemegang gadai tetap memiliki hak gadai meskipun pemberi gadai bukan orang yang berwenang untuk itu. Apabila benda gadai hasil kejahatan masuk ke Pegadaian tetapi tidak ada laporan dari pemilik sebenarnya, maka perjanjian gadai tetap berlangsung seperti biasanya. Permasalahan baru timbul jika pemilik



sebenarnya dari benda gadai menuntut pengembalian benda itu dari Pegadaian atau melaporkan kejahatan tersebut ke polisi.

Dalam pemberian kredit gadai, ukuran itikad baik menjadi faktor penting dalam perjanjian gadai antara pemberi gadai dan pemegang gadai. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 533 KUHPerdara yang menyatakan bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada pada pemegang kedudukan. Oleh karena itu, Pegadaian dalam menerima barang yang digadaikan selalu didasarkan pada itikad baik seseorang, bahwa orang yang akan menggadaikan barang jaminan itu adalah orang yang benar-benar mempunyai kewenangan bertindak secara hukum. Pegadaian tidak mempermasalahkan mengenai asal barang gadai, karena barang yang digadaikan tidak harus dimiliki oleh debitur sendiri, barang milik orang lainpun dapat digadaikan, asalkan dilampiri dengan surat kuasa dari pemilik barang. Berdasarkan itikad baik tadi, maka siapa saja yang datang ke Pegadaian dengan membawa barang jaminan dianggap sebagai pemilik sebenarnya dari barang jaminan tersebut. Ketentuan yang mengatur mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

*'Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya'*

Dengan demikian benda yang melekat pada seseorang maka senyatanya seseorang menguasai benda itu seolah-olah kepunyaan sendiri,

yang dilindungi oleh hukum dengan tidak mempermasalahkan asal benda tersebut.

Dalam hal permasalahan benda gadai yang diperoleh dari hasil pencurian atau penggelapan, maka harus ada laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan, yaitu pemilik sebenarnya. Pemilik benda gadai yang merasa kehilangan dapat merevindikasi benda miliknya yang telah digadaikan oleh orang lain kepada pemegang gadai, dengan memperhatikan batas waktu untuk merevindikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1977 ayat (2) yang menentukan bahwa :

*'Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang, di dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya'*

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pemilik barang (*eigenaar*) yang telah kehilangan kekuasaan atas benda miliknya dapat merevindikasi atau menuntut kembali barang miliknya dari pemegang gadai dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 3 tahun sejak kehilangan atau dicurinya benda miliknya.

Pemilik barang (*eigenaar*) untuk mendapatkan kembali barang miliknya bisa menempuh dua cara, yaitu dengan cara damai dan musyawarah atau dengan menempuh prosedur hukum. Untuk kasus penggelapan biasanya ditempuh dengan cara damai, yaitu diadakan musyawarah antara pemilik barang dengan pelaku penggelapan, sehingga akan diperoleh kata sepakat mengenai penyelesaian masalahnya. Pelaku

penggelapan akan melunasi hutangnya ke Pegadaian, dan kemudian barang gadai diserahkan kembali kepada *eigenaar*.

Untuk kasus pencurian, *eigenaar* bisa juga menempuh jalan damai atau secara kekeluargaan. Hal ini dimungkinkan jika *eigenaar* sebelumnya sudah mengetahui dan mengenal pelaku pencurian. Dengan cara damai ini diharapkan si pencuri mau melunasi hutangnya di Pegadaian dan kemudian mengembalikan barang gadai kepada *eigenaar*. Dalam hal ini, apabila *eigenaar* setelah mendapatkan kembali barang miliknya kemudian melaporkan kasus pencurian tersebut ke polisi, maka barang jaminan itu akan dijadikan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan pihak Pegadaian akan dijadikan sebagai saksi.

Apabila *eigenaar* menempuh prosedur hukum untuk merevindikasi benda miliknya, maka ia harus membuat laporan kehilangan kepada yang berwajib (polisi), sehingga berdasarkan pengaduan tersebut polisi bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pencurian. Selanjutnya polisi dapat melakukan penyitaan terhadap barang jaminan hasil curian yang ada di Pegadaian untuk dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan lebih lanjut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 KUHP, bahwa penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk diserahkan kepadanya.

Untuk dapat melakukan penyitaan terhadap barang jaminan yang ada di Pegadaian, polisi harus membawa surat resmi dari Pengadilan yang memerintahkan untuk itu. Sebelumnya Pegadaian akan meminta kepada

polisi agar bersedia melakukan penyitaan di tempat (sita di tempat), sehingga barang bukti tetap berada di Kantor Pegadaian.

Penyelesaian terhadap masalah barang jaminan yang diperoleh dari hasil curian harus melalui ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian. Adapun tahapan-tahapan dalam penyelesaian terhadap masalah barang curian dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tahap penyidikan oleh kepolisian / kejaksaan

- 1) Apabila ada pihak kepolisian / kejaksaan yang akan meminta barang jaminan hasil curian tersebut, dilayani dengan sita di tempat, dengan membuat Surat Keterangan Sita di Tempat yang dilampiri foto barang jaminannya
- 2) Surat Keterangan Sita di Tempat tersebut dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh pihak Pegadaian dan kepolisian / kejaksaan dengan membubuhi cap dinas masing-masing
- 3) Barang tersebut disegel oleh kepolisian / kejaksaan dan pihak pengadilan, dan dicatat dalam Buku Barang Jaminan Sita di Tempat.
- 4) Apabila pihak kepolisian / kejaksaan meminta informasi tentang barang tersebut, kepala cabang / pegawai dapat memberikan kesaksiannya melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah mendapat ijin dari Kepala Kantor Daerah. BAP ini dibuat rangkap tiga, lembar I untuk kepolisian / kejaksaan, lembar II untuk Pegadaian dan lembar III untuk yang bersangkutan.
- 5) Apabila di kemudian hari kepala cabang / pegawai ternyata diduga sebagai tersangka, proses BAP nya harus didampingi oleh jaksa

sebagai pengacara negara atau pengacara lain yang ditunjuk oleh pengadilan.

- 6) Apabila pihak kepolisian / kejaksaan mengusulkan penyelesaian secara damai, dapat dilayani melalui proses pelunasan. Penyerahan barang jaminannya dilakukan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait

b. Tahap penyelesaian di pengadilan

- 1) Apabila proses penyelesaian barang jaminan tersebut berlanjut sampai tingkat pengadilan, maka hakim meminta barang jaminan tersebut sebagai barang bukti. Kepala cabang dapat menyerahkan secara fisik barang tersebut untuk selama berlangsungnya persidangan. Penyerahan tersebut dilakukan dengan Surat Keterangan Pinjam Pakai Sementara yang ditandatangani oleh panitera pengadilan
- 2) Setiap kali selesai sidang, barang jaminan diminta kembali dari hakim untuk disimpan di Pegadaian
- 3) Proses persidangan dapat berlangsung berulang-ulang sampai ada keputusan hakim
- 4) Keputusan hakim atas barang jaminan tersebut berupa :
  - a. Dikembalikan ke cabang untuk diserahkan kepada yang berhak sebagai pelunasan biasa, maka keputusan tersebut dicatat dalam Buku Barang Jaminan Sita di Tempat. Batas pelunasannya adalah satu bulan terhitung sejak keputusan

hakim. Lebih dari batas waktu tersebut barang jaminan akan dilelang

- b. Dikembalikan kepada yang berhak oleh hakim secara cuma-cuma, maka keputusan tersebut dicatat dalam Buku Barang Jaminan Sita di Tempat. Keputusan tersebut harus dinyatakan dalam Surat Keputusan. Jika barang tersebut berdasarkan Surat Keputusan dikembalikan secara cuma-cuma, maka barang tersebut diselesaikan sebagai 'pelunasan administratif', artinya dilunasi dengan tidak membayar Uang Pinjaman dan Sewa Modal. Uang pinjaman dan sewa modal tersebut menjadi beban perusahaan
- c. Untuk Barang Sisa Lelang (BSL) tidak dapat diputuskan untuk diberikan kepada yang bersangkutan secara cuma-cuma, karena barang tersebut telah dibeli oleh perusahaan, sehingga apabila diputuskan untuk dikembalikan kepada yang berhak, maka yang bersangkutan harus membayar ongkos dari pembelian tersebut.

Dalam kasus barang jaminan hasil curian yang terjadi di Pegadaian Cabang Tegal, polisi tidak bersedia untuk melakukan sita di tempat. Polisi bersikeras membawa barang bukti untuk disimpan di instansinya, dengan alasan untuk memudahkan dalam pemeriksaan lebih lanjut, dan di samping itu pihak kepolisian khawatir bahwa tersangka atau pihak yang menguasai barang akan merusak, menghilangkan, atau memindahkan barang bukti.

Menurut penulis, sebelum ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, benda gadai tidak boleh keluar dari Pegadaian. Dalam proses persidangan, pengadilan dapat meminjam barang bukti itu dari Pegadaian, tetapi harus dikembalikan lagi setelah proses persidangan berakhir. Hal itu dapat dilakukan berulang-ulang sampai diperoleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Setelah memperoleh penetapan resmi dari pengadilan yang memerintahkan penyitaan barang jaminan, maka polisi kemudian melaksanakan penyitaan tersebut, dan pihak Pegadaian menerima Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti yang ditandatangani oleh polisi yang bersangkutan, Manajer Cabang Pegadaian dan dua orang saksi.

Dalam proses persidangan, pihak Pegadaian bertindak sebagai saksi yang diwakili oleh seorang penaksir barang jaminan. Dalam kesaksiannya pihak Pegadaian memberikan keterangan bahwa dalam pemberian kredit gadai selalu mendasarkan pada itikad baik nasabah dalam memberikan informasi yang benar, dan disamping itu juga selalu mengacu pada ketentuan Pasal 1977 KUHPdata, yaitu bahwa siapa saja yang membawa atau menguasai suatu benda bergerak maka dianggap sebagai pemiliknya, sehingga Pegadaian tidak mempunyai alasan untuk menolak permintaan kredit nasabah yang bersangkutan karena berkesimpulan bahwa nasabah tersebut adalah pemilik barang yang sah dan bukan memperoleh dari hasil kejahatan.

Penulis tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Pegadaian sebagai pemegang gadai dapat diduga sebagai penadah barang-barang dari hasil kejahatan. Menurut penulis, Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjalankan misinya melalui pemberian kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 / Tahun 2000. Jadi kegiatan operasional Pegadaian selalu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menerima barang yang berasal dari kejahatan sebagai jaminan kredit.

Setelah melalui proses persidangan beberapa kali, kasus barang jaminan hasil curian tersebut di atas memperoleh putusan dari pengadilan, yaitu memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada pemilik barang. Dengan adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ini, maka pihak Pegadaian harus menyerahkan barang jaminan yang dijadikan sebagai barang bukti ini ke pemilik sebenarnya. Dalam hal ini, pemilik barang tidak diwajibkan untuk membayar uang pinjaman kepada pihak Pegadaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 582 KUHPdata yang menyebutkan :

*'Barang siapa menuntut kembalinya suatu kebendaan yang telah dicuri atau dihilangkan, tak diwajibkan memberi penggantian kepada si yang memegangnya, untuk uang yang telah dibayarkannya guna membelinya, kecuali kebendaan itu dibelinya di pasar tahunan atau pasar lainnya, di pelelangan umum, atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai seorang yang biasanya memperdagangkan barang-barang sejenis itu'*



Mengenai hal ini penulis sependapat, karena dalam kasus barang curian ini pemilik barang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pegadaian. Pihak *eigenaar* kedudukannya sangat kuat, karena mempunyai bukti-bukti yang kuat dan sah mengenai kepemilikan barang. Kedudukan pemilik barang (*eigenaar*) dilindungi oleh hukum, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 1977 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

*'Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, didalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya'*

Dari pasal tersebut juga dapat disimpulkan, bahwa pihak Pegadaian dapat menuntut ganti rugi kepada debitur yang telah menyebabkan kerugian perusahaan. Dalam Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara dijelaskan bahwa hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai. Dengan diserahkannya benda gadai kepada pemilik barang, maka benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai, sehingga hak gadai menjadi hapus. Meskipun demikian, pihak Pegadaian tetap berhak untuk menuntut ganti rugi kepada debitur agar melunasi uang pinjaman beserta sewa modalnya. Pegadaian juga berhak menuntut debitur untuk melunasi pinjamannya walaupun debitur sedang menjalani hukuman yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini didasarkan pada isi perjanjian yang tertuang dalam Surat Bukti Kredit, yang pada hakekatnya merupakan surat pengakuan hutang dari pihak debitur kepada kreditur. Dengan demikian, SBK adalah bukti yang kuat mengenai telah terjadinya perjanjian kredit antara debitur dengan

kreditur. Pegadaian dapat juga mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi pada debitur. Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, pihak Pegadaian harus mempunyai bukti-bukti yang kuat, sehingga hal ini akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ganti rugi.

Menurut Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegal, untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agar debitur melunasi hutangnya, membutuhkan biaya yang cukup besar dan memerlukan waktu lama. Terkadang biaya untuk berperkara di pengadilan bisa lebih besar dari pada jumlah ganti rugi yang dituntut. Kecuali untuk tuntutan ganti rugi atau pelunasan hutang dalam jumlah yang cukup besar, maka masih dimungkinkan untuk menggugat ke pengadilan. Oleh karena itu, dalam kasus barang curian tersebut di atas, pihak Pegadaian menuntut pelunasan hutang dari debitur dengan cara damai dan tidak melalui gugatan ke pengadilan. Dengan berbagai cara pihak Pegadaian berusaha agar debitur bisa melunasi hutangnya, tetapi karena debitur adalah orang yang tidak mampu dan suaminya sedang berada di tahanan karena pencurian itu, maka Pegadaian mengalami kesulitan untuk mendapatkan ganti rugi. Kemudian setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya pihak Pegadaian dengan seijin Kantor Wilayah Pegadaian Semarang, menghapuskan uang pinjaman tersebut dan menjadi beban atau kerugian perusahaan.<sup>33)</sup>

---

<sup>33)</sup> Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegal, Hasil Wawancara, Tegal, 18 September 2003

Dalam hal barang jaminan yang berasal dari penggelapan, biasanya diselesaikan secara damai atau kekeluargaan, yaitu dengan jalan musyawarah sehingga diperoleh kata sepakat antara pemilik barang dengan pelaku penggelapan. Penyelesaian yang sering dilakukan adalah dengan pelunasan hutang gadai oleh pelaku penggelapan, dan selanjutnya benda gadai diserahkan kembali kepada pemilik barang. Pemilik barang juga mempunyai hak untuk menuntut kembali benda gadai miliknya yang digelapkan dengan melalui proses hukum. Benda gadai dapat dikembalikan kepada pemilik sesungguhnya apabila diperintahkan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi pemilik barang itu terlebih dahulu harus mengembalikan uang pinjaman beserta sewa modal yang diberikan Perum Pegadaian pada debitur.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan melakukan wawancara, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang jaminan yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, seperti terjadinya kebakaran, banjir, dan lain-lain, maka kepada debitur yang bersangkutan diberikan uang pengganti kerugian sebesar 125 % dari nilai taksiran barang jaminan, sedangkan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan yang disebabkan karena kesalahan petugas tetapi tidak ada kesengajaan, maka pihak Pegadaian bertanggung jawab untuk memperbaiki barang jaminan yang rusak, dan bertanggung jawab untuk mencari barang jaminan yang hilang atau memberi ganti rugi kepada nasabah dengan cara memberikan barang lain yang sejenis dengan barang jaminan yang hilang.
2. Apabila terjadi permasalahan benda gadai yang diperoleh dari hasil pencurian, maka pemilik barang dapat merevindikasi atau menuntut kembali bendanya yang telah digadaikan itu kepada pemegang gadai dengan menempuh prosedur hukum. Hak untuk merevindikasi ini berlaku dalam jangka waktu tiga tahun sejak kehilangan barang tersebut,

dengan tak mengurangi hak pemegang gadai untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barang tersebut. Jika di pengadilan terbukti bahwa benda gadai adalah milik *eigenaar* yang telah dicuri, maka pengadilan akan memerintahkan kepada Pegadaian untuk menyerahkan benda gadai tersebut kepada pemilik barang dengan cuma-cuma, dan selanjutnya pihak Pegadaian dapat menuntut ganti rugi kepada debitur yang bersangkutan. Kemudian dalam hal permasalahan benda gadai dari hasil penggelapan, pemilik barang tidak dapat melakukan revindikasi. Benda gadai dapat dikembalikan kepada pemilik sebenarnya dengan cara pelunasan uang pinjaman beserta sewa modal yang telah diberikan oleh Perum Pegadaian kepada debitur. Pelunasan ini bisa dilakukan oleh debitur sendiri maupun oleh pemilik barang

## **B. Saran**

Untuk menghindari terjadinya kerusakan dan kehilangan barang jaminan, maka Perum Pegadaian hendaknya lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan, sehingga barang jaminan selalu dalam keadaan bersih dan tidak berdebu, dan selain itu, pihak Pegadaian hendaknya lebih teliti dalam mengeluarkan barang jaminan pelunasan, sehingga dapat dihindari kekeliruan penyerahan barang jaminan. Kemudian untuk mencegah masuknya benda gadai yang berasal dari kejahatan, baik pencurian maupun penggelapan, pihak Pegadaian dalam menerima benda gadai hendaknya lebih berhati-hati, sehingga Pegadaian

tidak dirugikan. Pegadaian harus menanyakan dan meneliti dengan baik bukti identitas diri dan bukti kepemilikan barang jaminan, yang bisa berupa kuitansi pembelian, STNK / BPKB dan lain-lain yang dinilai sah. Sebaiknya nasabah juga diminta untuk membuat surat pernyataan sebagai pemilik barang yang dijadikan jaminan, yang dibuat di hadapan penaksir atau Manajer Cabang. Untuk barang jaminan yang berupa kendaraan bermotor atau mobil, Pegadaian harus mengecek bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK ke Kantor Samsat yang terkait, sehingga akan diperoleh kepastian tentang kepemilikannya. Terhadap nasabah yang bukan pemilik barang jaminan, sebaiknya diminta untuk membuat surat kuasa khusus bermeterai secukupnya dengan melampirkan copy kartu identitas masing-masing pihak dan ditandatangani oleh pemilik barang dan nasabah yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Purwahid Patrik dan Kashadi, **Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001
- Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, **Lembaga Keuangan dan Pembiayaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- P.J. Soepratignya, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Hukum Benda**, Jilid 2, Seksi Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1983
- Purwahid Patrik dan Suharto, **Hukum Perdata I (Asas-Asas Hukum Benda)**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1996
- Ketut Sethyon, **Pegadaian, Menapak ke Masa Depan Dengan Kegigihan Masa Lalu**, Perum Pegadaian, Jakarta, 2002
- Mariam Darus Badruzaman, **Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia**, Alumni, Bandung, 1981
- Hartono Hadisuprpto, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan**, Liberty Yogyakarta, 1984
- Mariam Darus Badruzaman, **Mencari Sistem Hukum Benda Nasional**, alumni, Bandung, 1983
- Sri Seodewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Perdata, Hukum Benda**, Liberty, Yogyakarta, 1981
- J. Satrio, **Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Soetrisno Hadi, **Metode Research**, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983.
- Adang Maryuani, **Pegadaian**, Sanggabuwana, Jakarta, 1976
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia Jakarta, 1998
- Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian
- Peraturan Pemerintah Nomor : 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UPT-PUSTAK-UNDIP